



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2026**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
KATA PENGANTAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi	3
C. Isu-isu Strategis	18
D. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran	20
E. Sistematika Penulisan	25
F. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025	26
BAB II PERENCANAAN KINERJA	29
A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	29
B. Strategi dan Arah Kebijakan	38
C. Perjanjian Kinerja	45
D. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	52
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	66
A. Capaian Kinerja Organisasi	66
B. Realisasi dan Efisiensi Anggaran	81
C. Inovasi	89
D. Penghargaan	90
BAB IV PENUTUP	91
A. Simpulan	91
B. Rekomendasi	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025	21
Tabel 1.2 Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan	24
Tabel 1.3 Tindak Lanjut atas LHE SAKIP Tahun 2025	26
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026.....	35
Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029.....	36
Tabel 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	38
Tabel 2.4 Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029.....	43
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Renstra 2021-2026	45
Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Renstra 2025-2029	45
Tabel 2.7 Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025	46
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal berdasarkan Renstra 2021-2026.....	66
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal berdasarkan Renstra 2025-2029.....	67
Tabel 3.3 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2026	68
Tabel 3.4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2025-2029	69
Tabel 3.5 Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 s.d 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2026	70
Tabel 3.6 Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 s.d 2025 Berdasarkan Renstra 2025-2029	71

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Awal Renstra 2021-2026 dengan Tahun Ini (Tahun 2021 dan Tahun 2025)	72
Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Awal Renstra 2025-2029 dengan Tahun Ini (Tahun 2021 dan Tahun 2025)	73
Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional Berdasarkan Renstra 2021-2026	74
Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional Berdasarkan Renstra 2025-2029	74
Tabel 3.11 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja Berdasarkan Renstra 2021-2026	75
Tabel 3.12 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja Berdasarkan Renstra 2025-2029	76
Tabel 3.13 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025 Renstra 2021-2026.....	77
Tabel 3.14 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025 Renstra 2025-2029.....	78
Tabel 3.15 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Kinerja Berdasarkan Renstra 2021-2026	79
Tabel 3.16 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Kinerja Berdasarkan Renstra 2025-2029	80
Tabel 3.17 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan.....	81
Tabel 3. 18 Efisiensi Anggaran	87
Tabel 3.19 Inovasi pada BPKAD Kab. Kendal Tahun 2025.....	89
Tabel 3.20 Rekapitulasi Perolehan Opini BPK RI pada Kabupaten Kendal 10 Tahun Terakhir	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Proses Bisnis Level 0 BPKAD	5
Gambar 1.2 Peta Proses Bisnis Level 1/ Sub Proses Map Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	6
Gambar 1.3 Peta Proses Bisnis Level 1/ Sub Proses Map Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	7
Gambar 1.4 Peta Proses Bisnis Level 1/ Sub Proses Map Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	8
Gambar 1.5 Peta Proses Bisnis Level 1/ Sub Proses Map Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	9
Gambar 1.6 Peta Proses Bisnis Level 1/ Sub Proses Map Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	10
Gambar 1.7 Peta Proses Bisnis Level 1/ Sub Proses Map Pengelolaan Barang Milik Daerah Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	11
Gambar 1.8 Peta Relasi Proses Bisnis.....	12
Gambar 1.9 Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Penyusunan Standar Harga	13
Gambar 1.10 Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14
Gambar 1.11 Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	15
Gambar 1.12 Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	16
Gambar 1.13 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	17
Gambar 1.14 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	22
Gambar 1.15 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat / Golongan	22
Gambar 1.16 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	23

Gambar 1.17 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	23
Gambar 2.1 Aplikasi Si-Eva.....	56
Gambar 2.2 Aplikasi SIMPOK	58
Gambar 2.3 Aplikasi ESR.Kemenpan-RB.....	59
Gambar 2.4 Aplikasi e-Kinerja	61
Gambar 2.5 Aplikasi e-SIMPEG	63
Gambar 2.6 Aplikasi KUSUKA	65

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu pada waktu yang telah ditentukan.

LKjIP sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kendal, bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Nomor 900/33/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Strategis 2021-2026, Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025, serta Rencana Strategis 2025-2029 yang telah ditetapkan.

Kendal, Januari 2026

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Kendal

MARDI EDI SUSILO, SE.Par, M.Par
Pembina Tk. I

NIP. 19670917 199103 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kendal menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama satu tahun anggaran. Penyusunan LKjIP ini merupakan amanat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kinerja melalui pengukuran, pelaporan, dan evaluasi capaian kinerja secara sistematis dan berkelanjutan.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, BPKAD Kabupaten Kendal bertanggung jawab dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Kinerja BPKAD secara langsung berkontribusi terhadap kualitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta pengawasan keuangan daerah, sekaligus menjadi fondasi bagi keberhasilan program dan kegiatan perangkat daerah lainnya. Seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), BPKAD dituntut untuk tidak hanya mampu menyerap anggaran, tetapi juga memastikan bahwa setiap program dan kegiatan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah.

LKjIP BPKAD Kabupaten Kendal disusun sebagai sarana evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, sekaligus sebagai media untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis organisasi. Melalui LKjIP ini, BPKAD menyajikan informasi kinerja yang terukur, termasuk capaian indikator kinerja, realisasi anggaran, serta faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan kegiatan.

Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah dan masyarakat, LKjIP juga menjadi instrumen penting dalam perumusan langkah perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*), penguatan perencanaan berbasis kinerja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dengan demikian, LKjIP diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan serta penyusunan program kerja BPKAD Kabupaten Kendal pada periode berikutnya, guna mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja capaian tujuan dan misi Pemerintah Kabupaten Kendal peralihan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2021-2026 ke RPJMD periode 2025-2029. Berdasarkan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan dapat menjadi media untuk membangun komitmen bersama guna peningkatan kinerja ke depan yang lebih produktif, efektif dan efisien dari segi perencanaan, pengorganisasian dan manajemen keuangan.

Penyusunan LKJIP BPKAD Kabupaten Kendal juga dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang objektif mengenai capaian kinerja program dan kegiatan, tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, serta kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah. Melalui LKJIP ini, diharapkan dapat terwujud peningkatan kualitas pengambilan keputusan, penguatan pengendalian internal, serta peningkatan kinerja pelayanan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah secara berkelanjutan.

Pada Tahun 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berupaya meningkatkan capaian sasaran strategis yang termuat dalam Renstra dan pencapaian target RPJMD. Pengukuran Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja / Penetapan Kinerja dengan realisasi kinerja yang telah dicapai. Selanjutnya dilakukan analisa dan tindakan perbaikan yang diperlukan pada masa yang akan datang.

Dengan disusunnya LKJIP BPKAD Kabupaten Kendal, diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran bagi seluruh pemangku kepentingan, sekaligus sebagai wujud komitmen BPKAD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, guna mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan pembangunan Kabupaten Kendal.

B. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

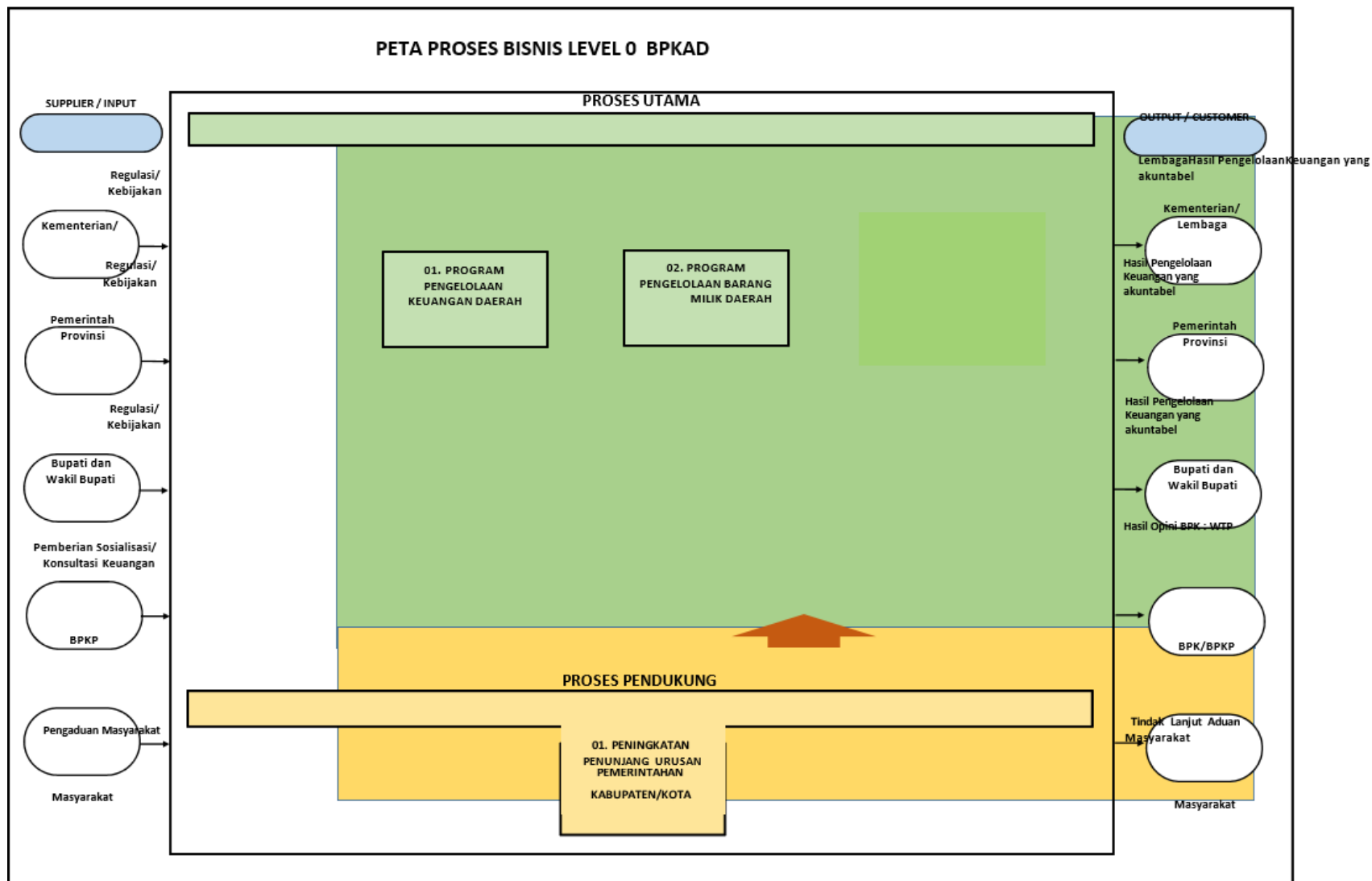
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal.

Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang keuangan;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan;
- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang keuangan;
- d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang keuangan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang keuangan;
- f. pelaksanaan administrasi Badan di bidang keuangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati di bidang keuangan.

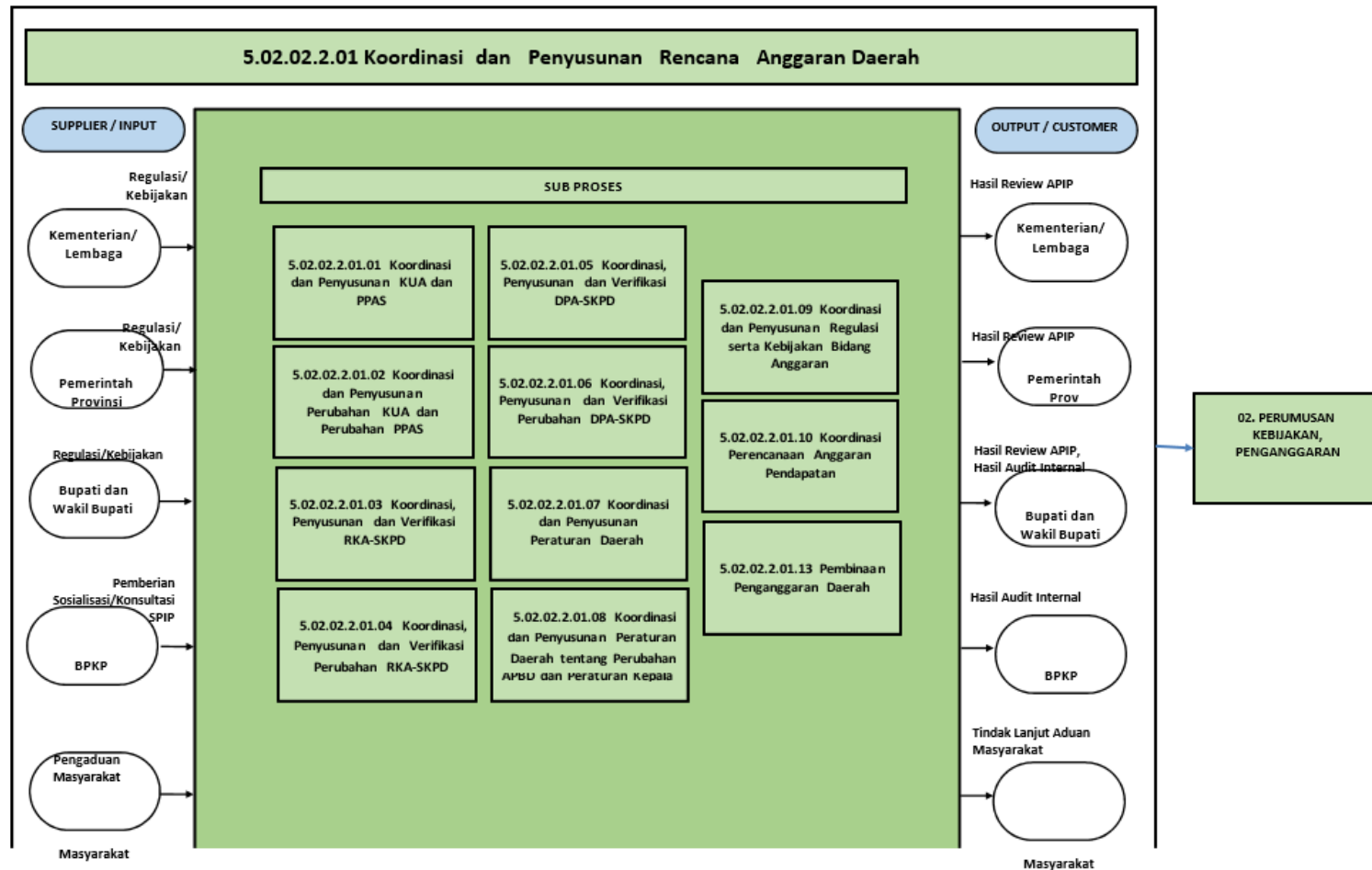
Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal menurut Peraturan Bupati Kendal Nomor 99 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat;
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Koordinator Perencanaan dan Keuangan.
 3. Bidang Anggaran;
 - a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
 - b. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
 - c. Sub Koordinator Analisis Kebijakan dan Evaluasi Anggaran
 4. Bidang Perbendaharaan dan Akutansi;
 - a. Sub Bidang Penatausahaan Belanja;
 - b. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
 - c. Sub Koordinator Pemegang Kas Daerah, Dana Perimbangan dan DanaTransfer Lainnya.
 5. Bidang Pengelolaan Aset Daerah;
 - a. Sub Bidang Penatausahaan, Pengamanan, dan Penilaian;
 - b. Sub Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan;
 - c. Sub Koordinator Perencanaan Kebutuhan, Penganggaran, dan Penggunaan.
 6. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- Kelompok Jabatan Fungsional.



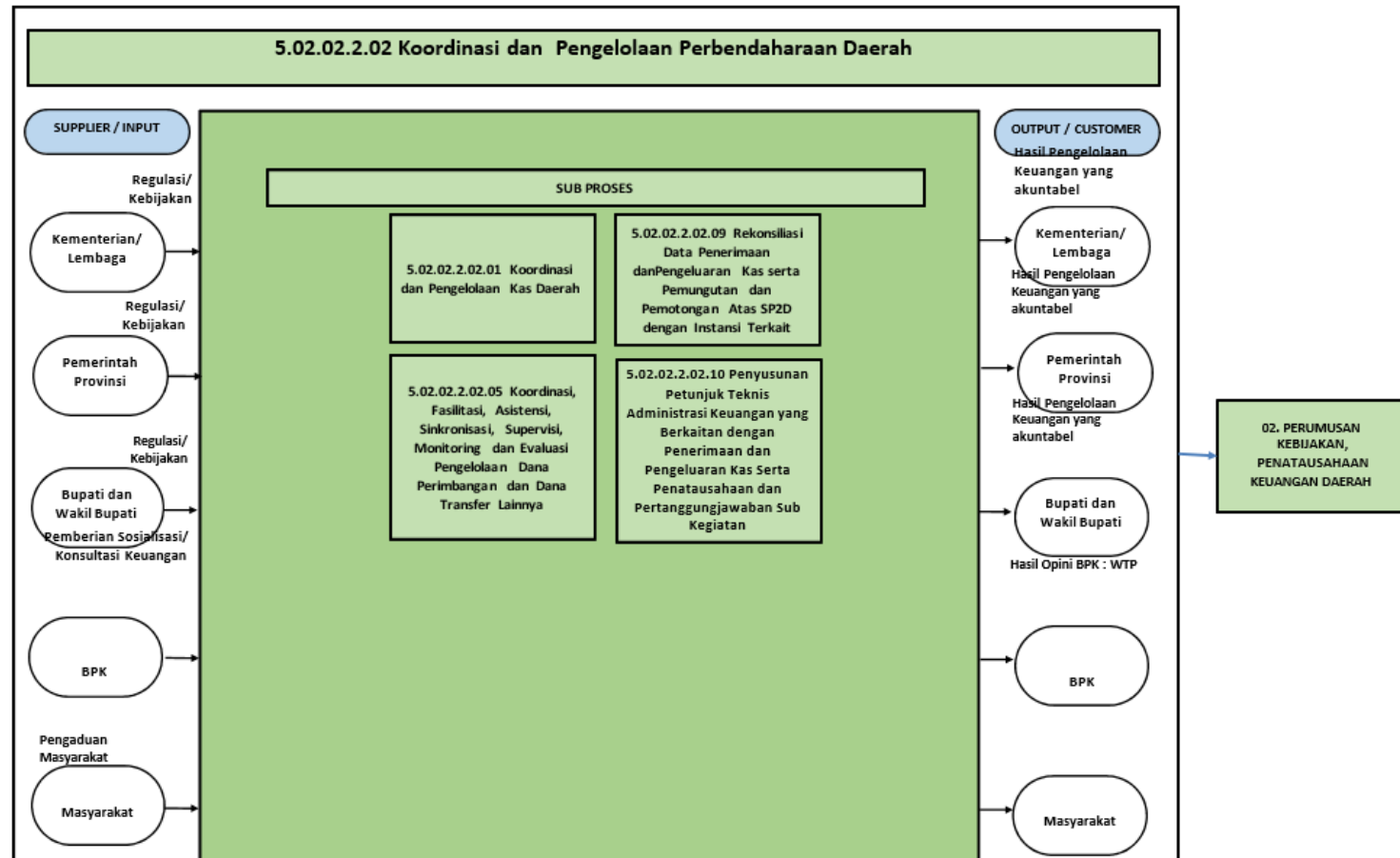
Gambar 1.1 Peta Proses Bisnis Level 0 BPKAD

PETA PROSES BISNIS LEVEL 1 / SUB PROSES MAP
01. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



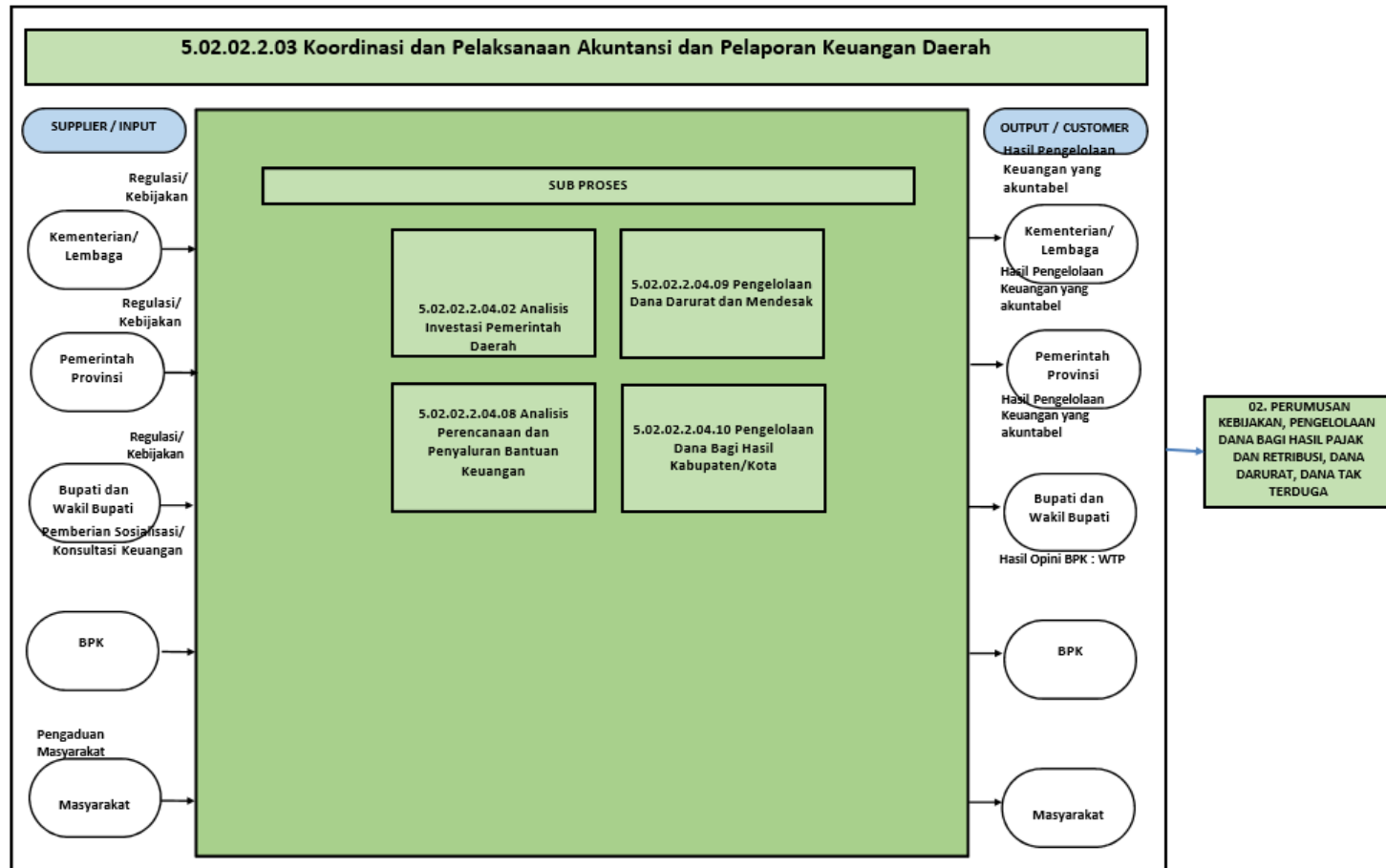
Gambar 1.2 Peta Proses Bisnis Level 1/ Sub Proses Map Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

**PETA PROSES BISNIS LEVEL 1 / SUB PROSES MAP
01. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**



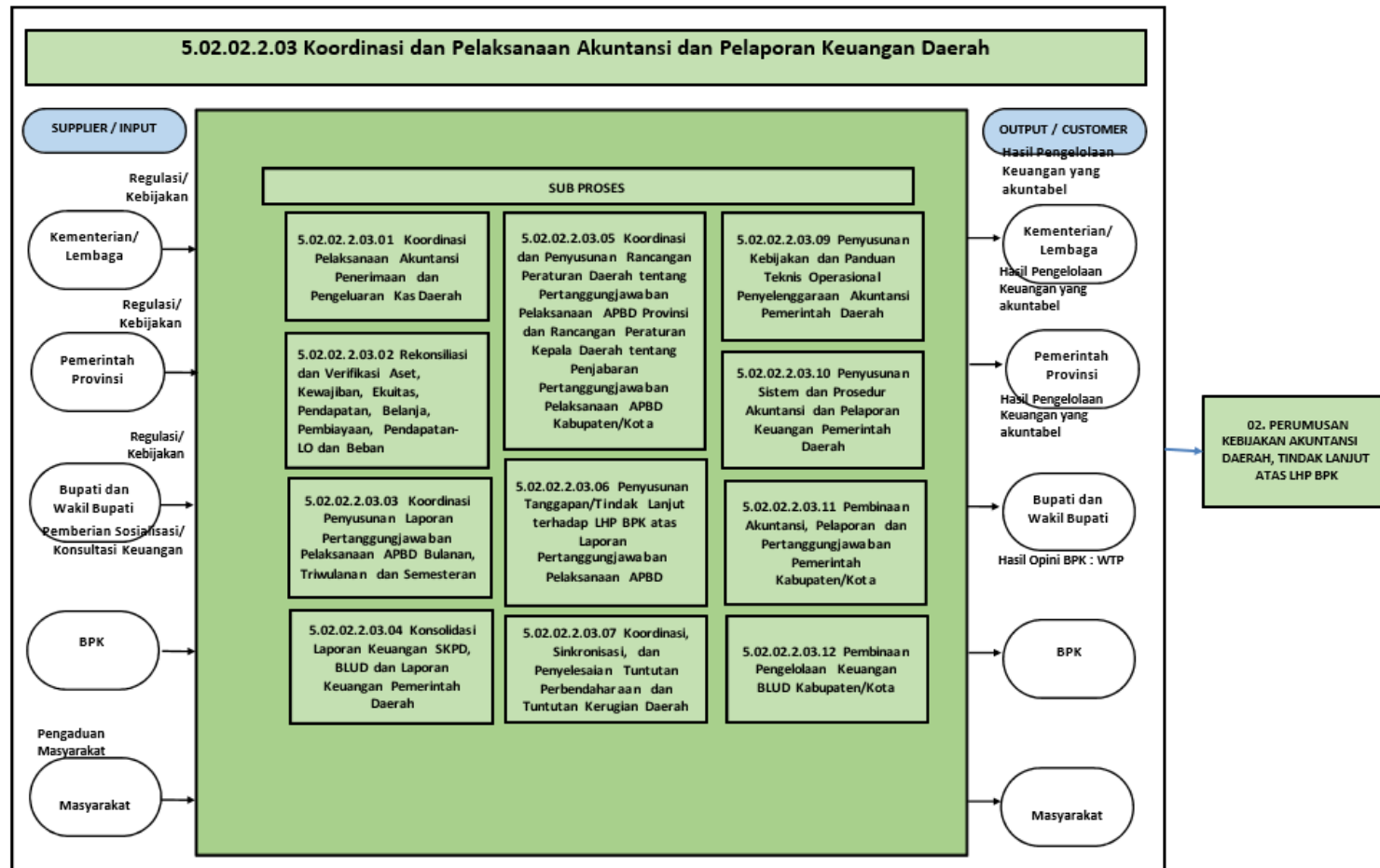
Gambar 1.3 Peta Proses Bisnis Level 1/ Sub Proses Map Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

PETA PROSES BISNIS LEVEL 1 / SUB PROSES MAP
01. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



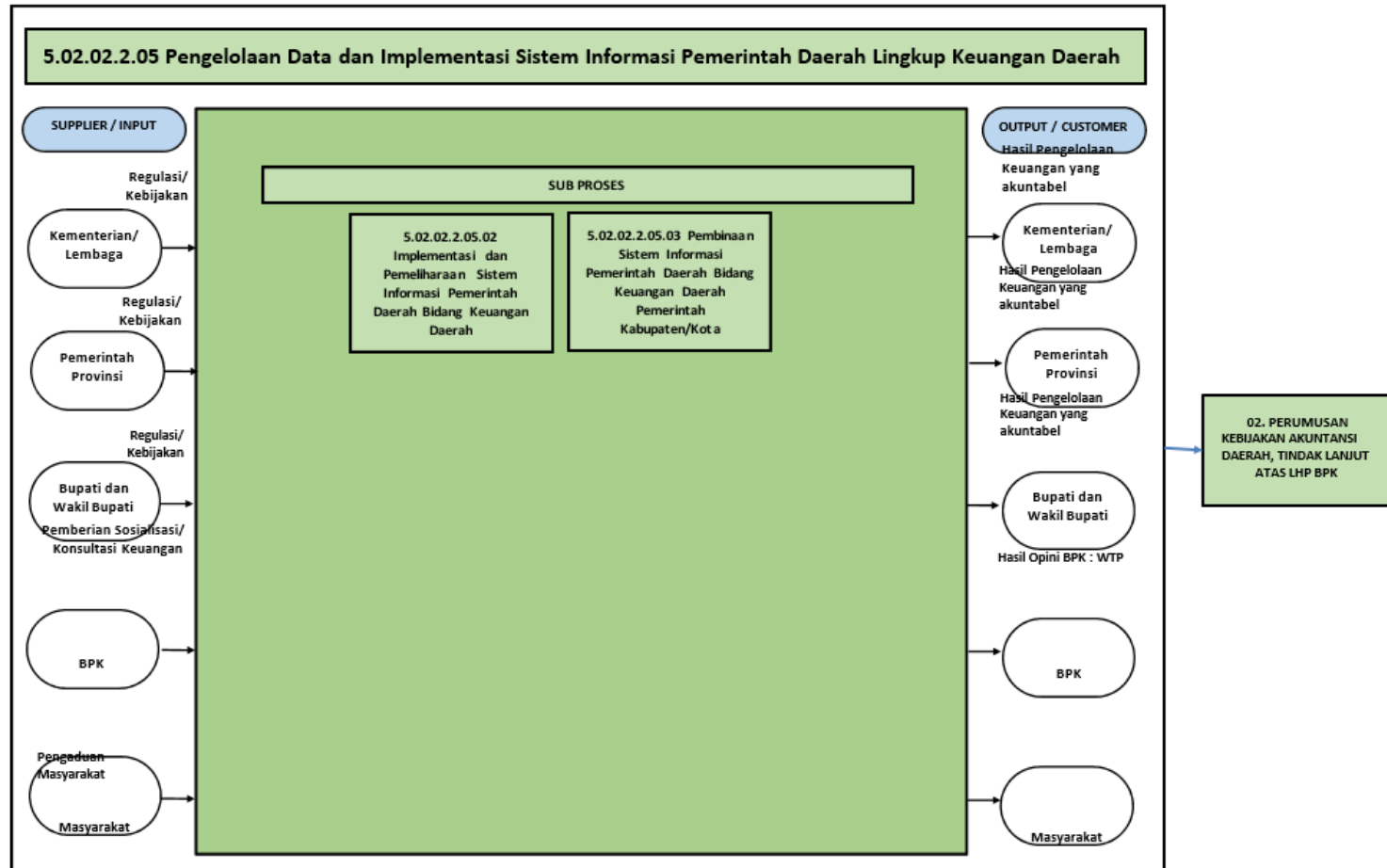
Gambar 1.4 Peta Proses Bisnis Level 1/ Sub Proses Map Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

PETA PROSES BISNIS LEVEL 1 / SUB PROSES MAP
01. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



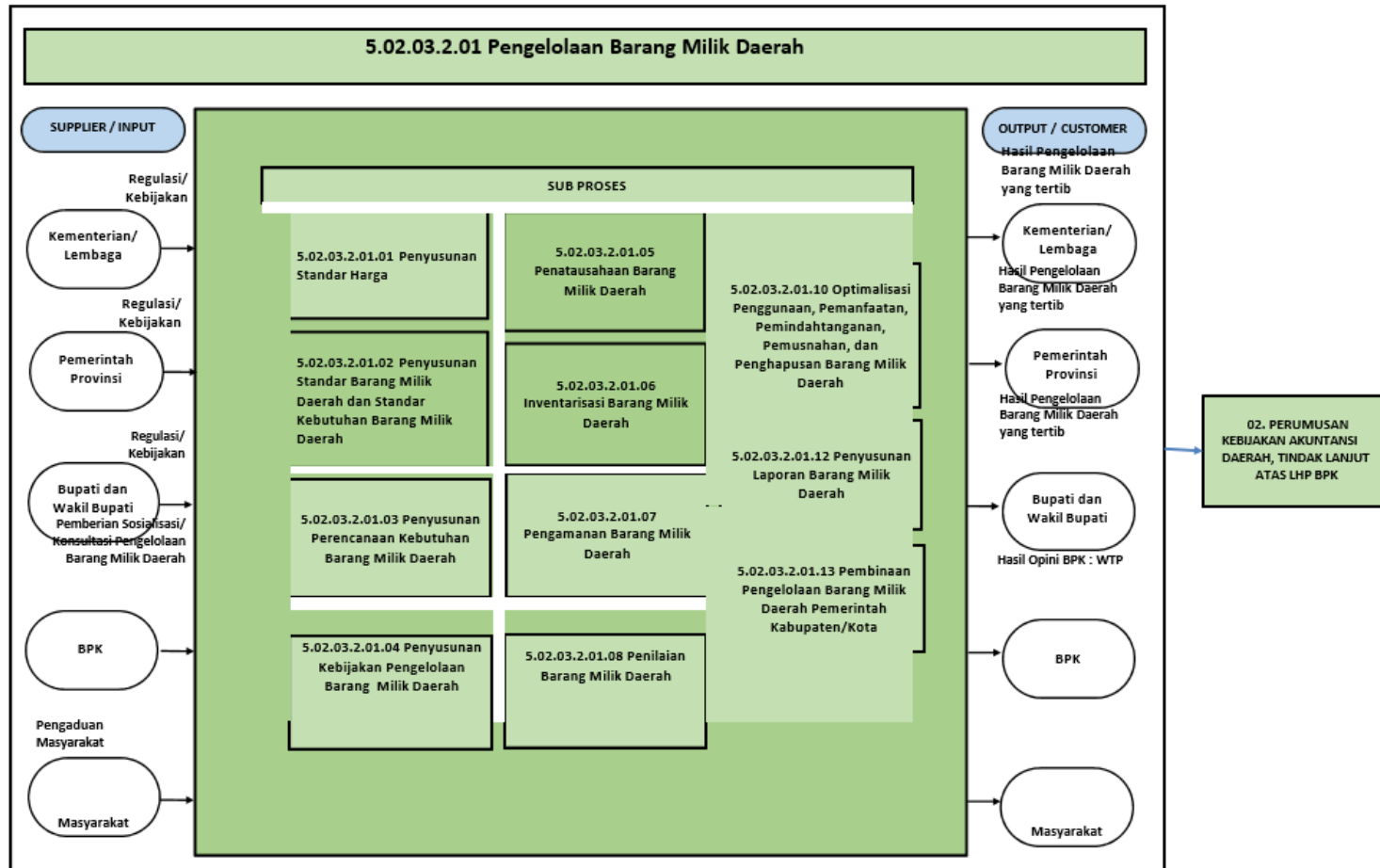
Gambar 1.5 Peta Proses Bisnis Level 1/ Sub Proses Map Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

PETA PROSES BISNIS LEVEL 1 / SUB PROSES MAP
01. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



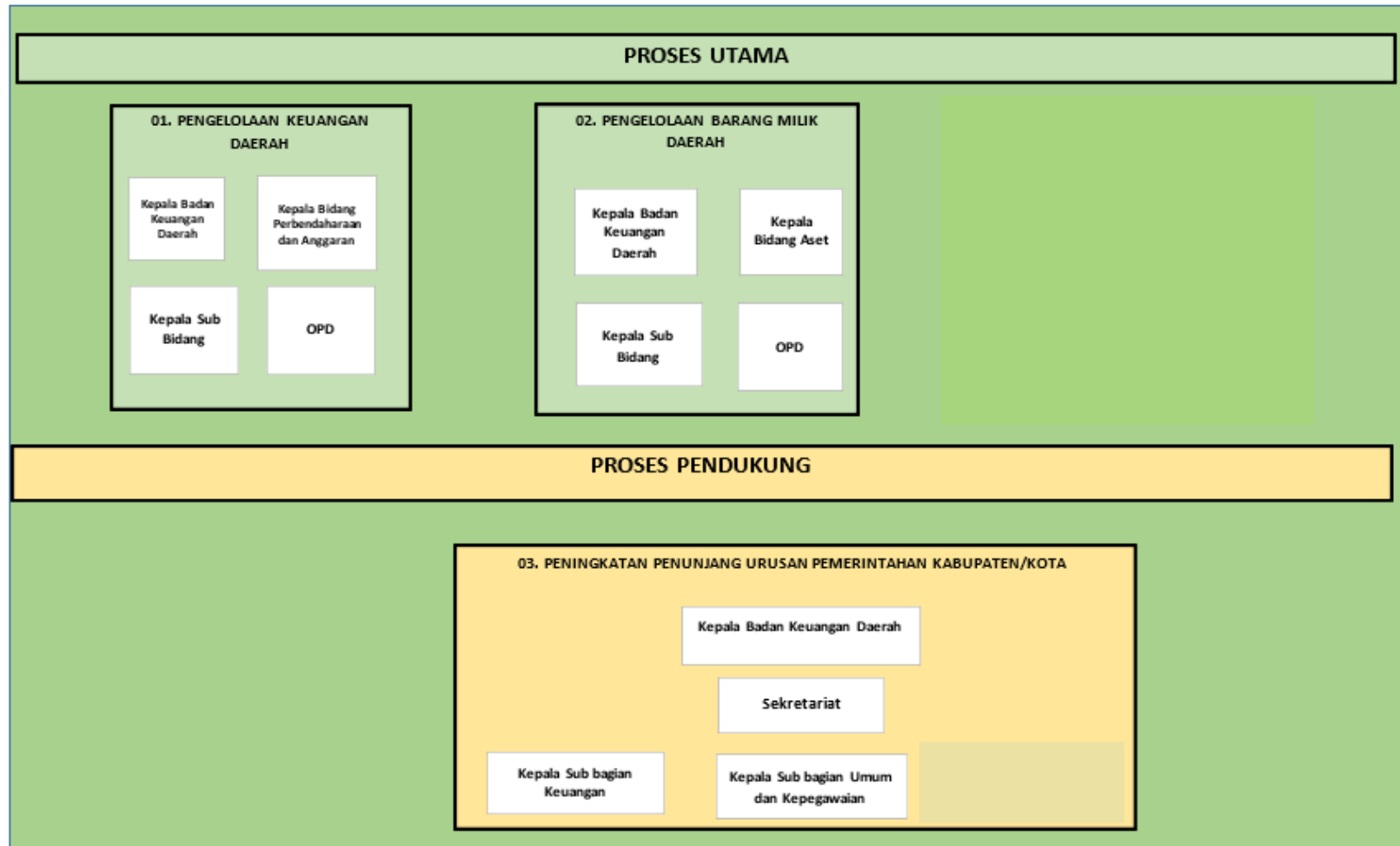
Gambar 1.6 Peta Proses Bisnis Level 1/ Sub Proses Map Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

PETA PROSES BISNIS LEVEL 1 / SUB PROSES MAP
02. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

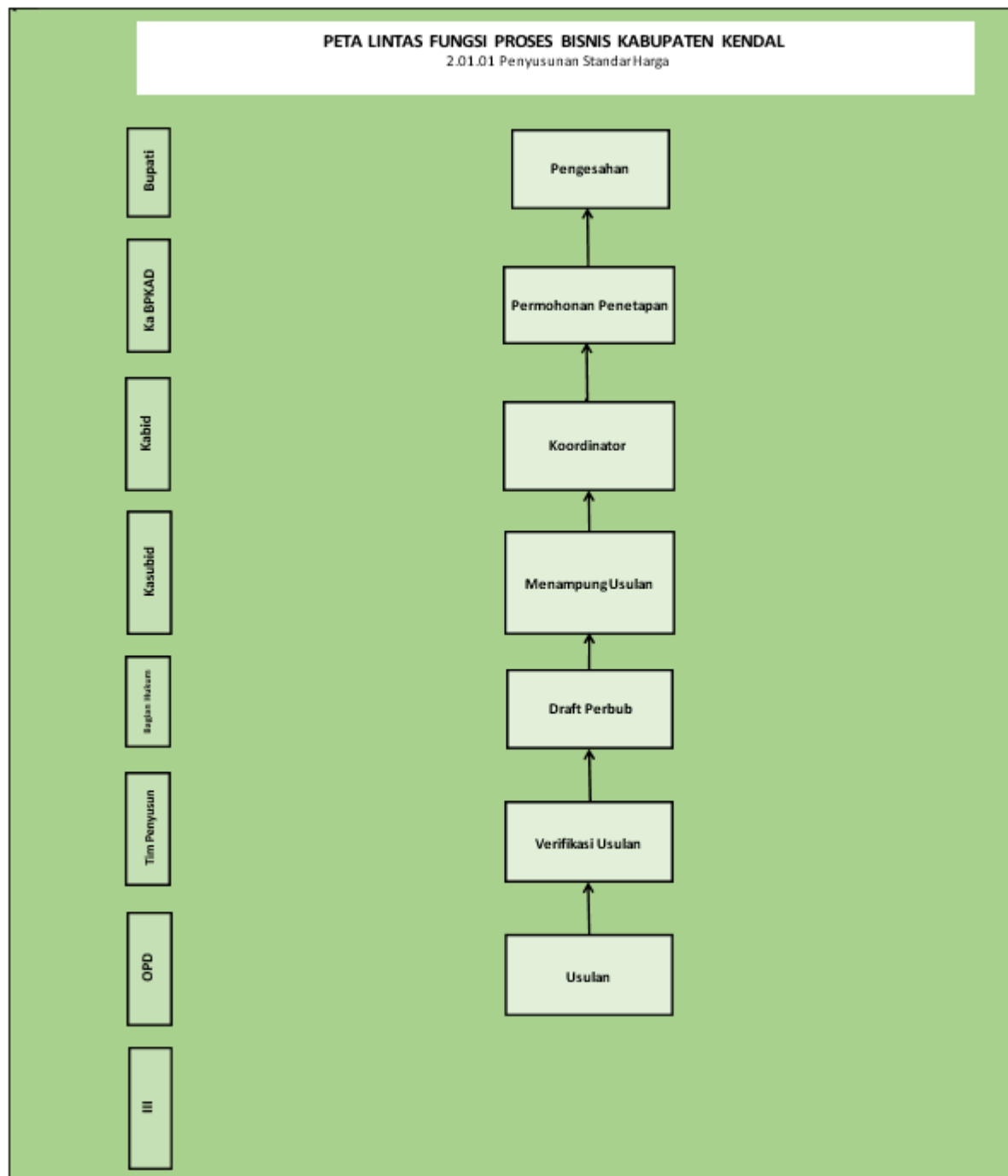


Gambar 1.7 Peta Proses Bisnis Level 1/ Sub Proses Map Pengelolaan Barang Milik Daerah Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

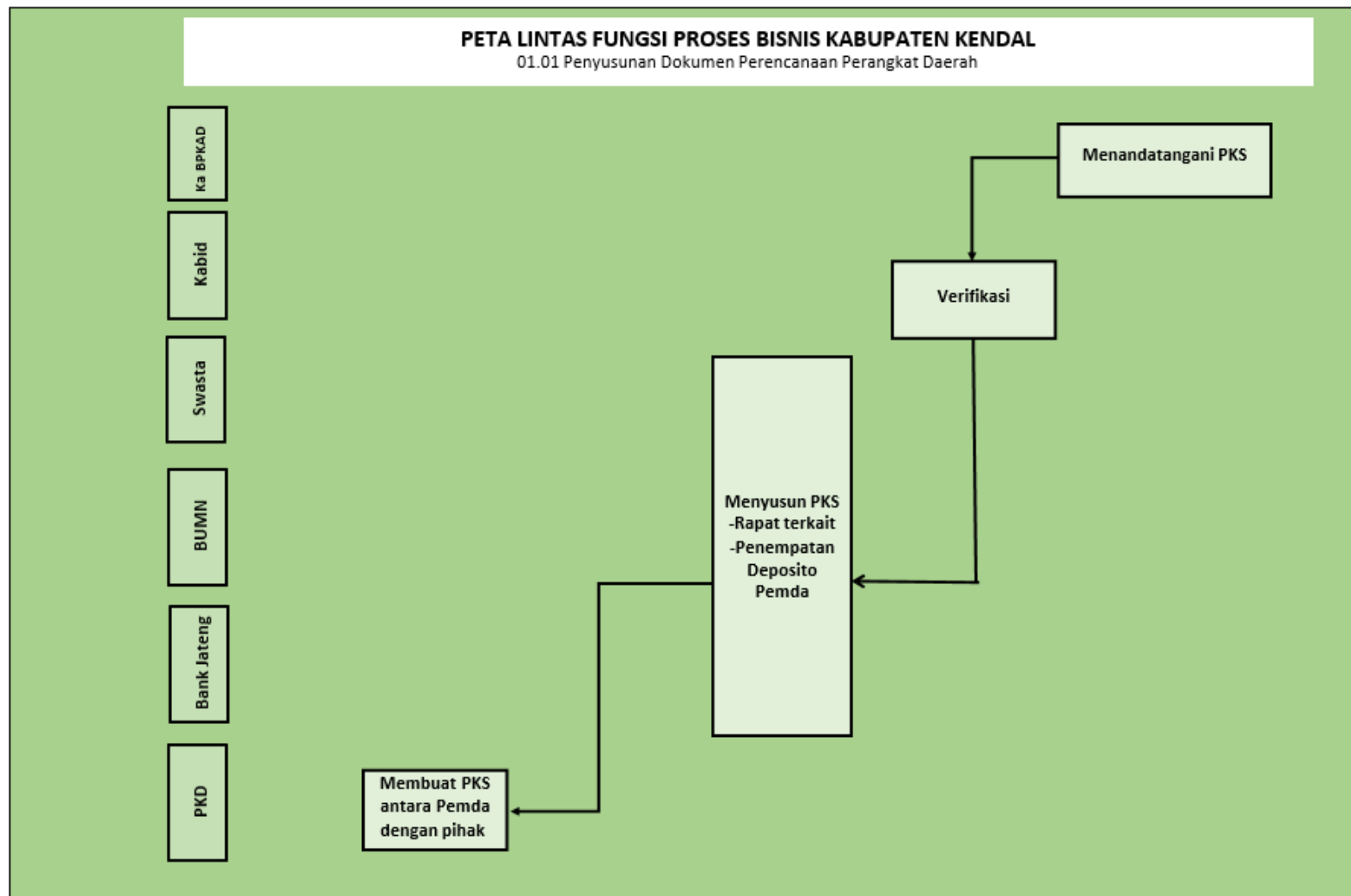
PETA RELASI PROSES BISNIS



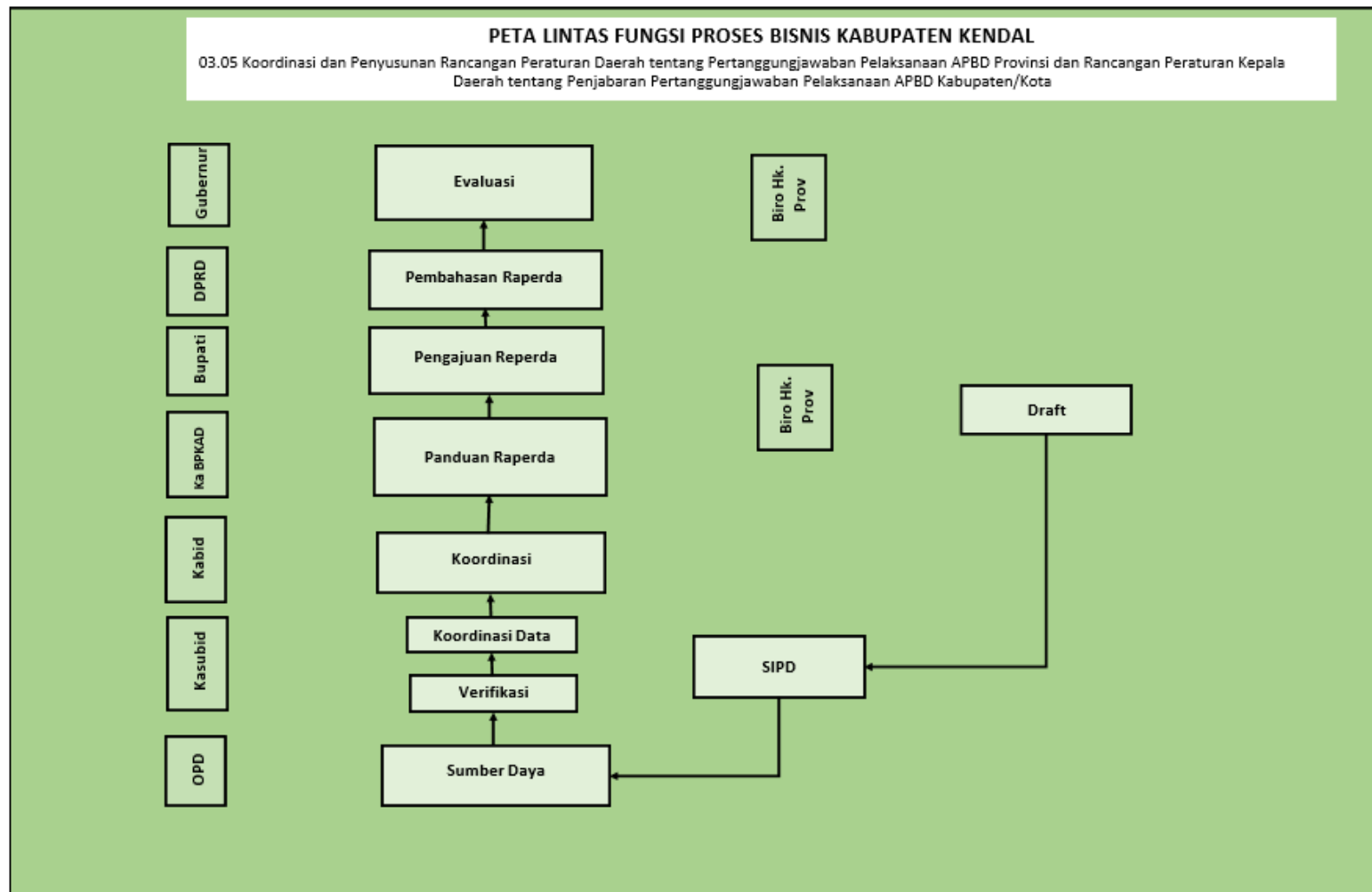
Gambar 1.8 Peta Relasi Proses Bisnis



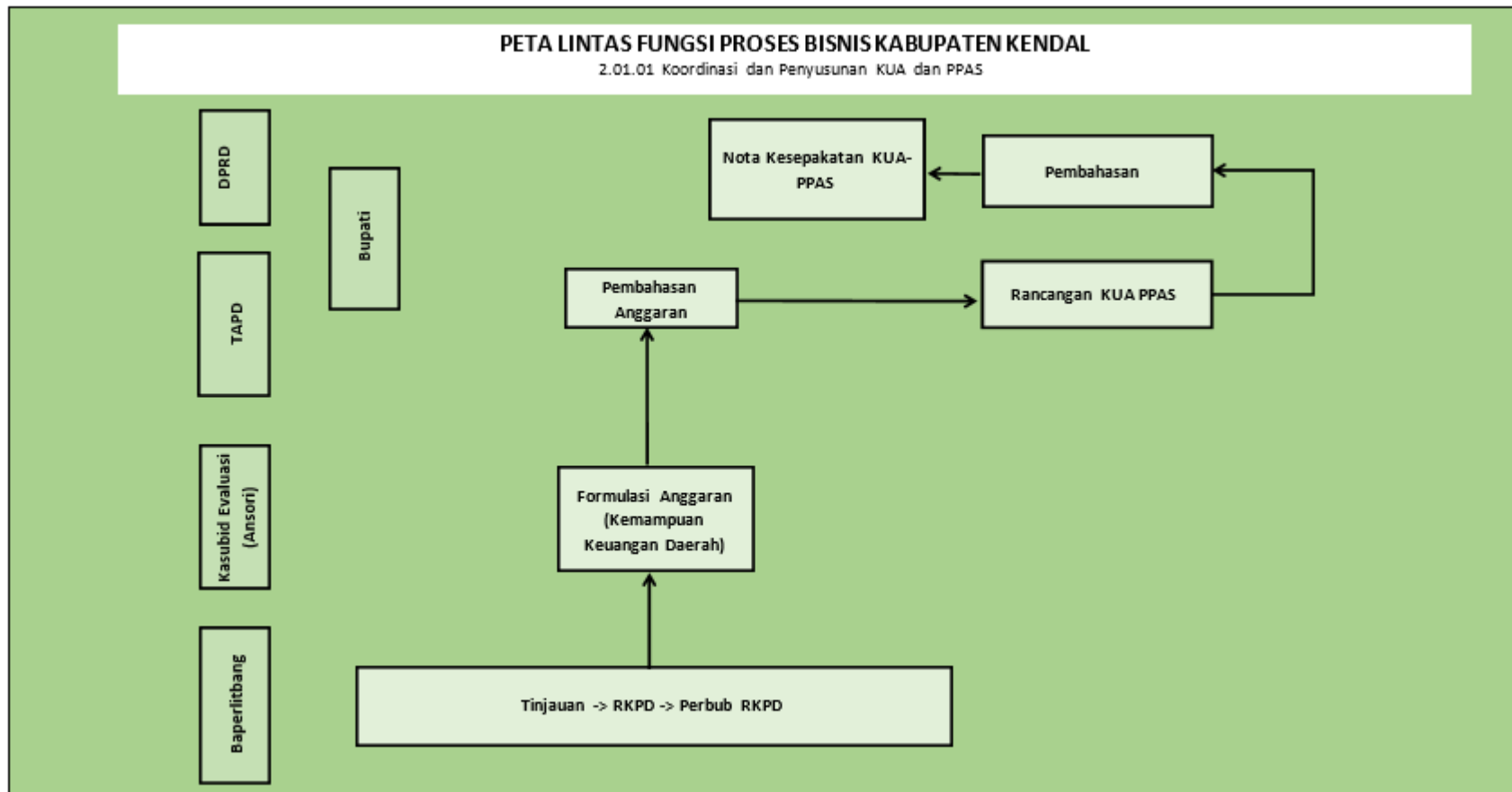
Gambar 1.9 Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Penyusunan Standar Harga



Gambar 1.10 Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah



Gambar 1.11 Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota



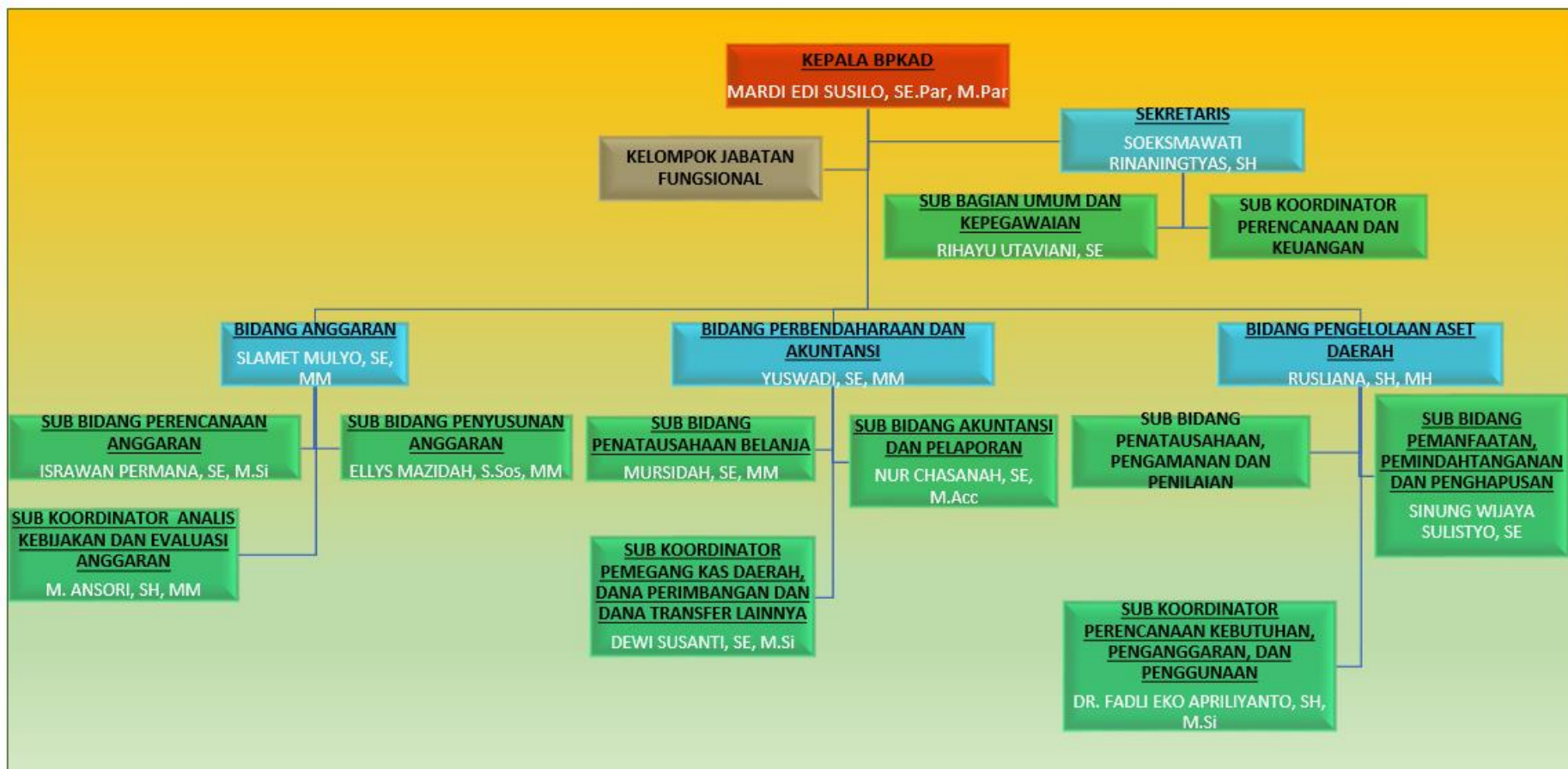
Gambar 1.12 Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS



Gambar 1.13

STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KENDAL



Gambar 1.13 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal

C. Isu-isu Strategis

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja, BPKAD Kabupaten Kendal menghadapi sejumlah isu strategis yang harus segera ditangani secara sistematis dan berkelanjutan. Isu-isu strategis ini mencerminkan permasalahan mendasar yang memiliki dampak luas terhadap efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Berikut isu strategis dimaksud:

- a. **Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Daerah**
Masih ditemukan ketidaktepatan antara dokumen perencanaan (RKPD, KUA-PPAS) dengan penganggaran (RKA/DPA), serta rendahnya implementasi anggaran berbasis kinerja.
- b. **Kurang Optimalnya Realisasi Anggaran dan Efisiensi Belanja Daerah**
Rendahnya serapan anggaran diawal tahun dan konsentrasi realisasi belanja diakhir tahun menunjukkan belum optimalnya manajemen pelaksanaan anggarann sehingga berdampak pada efektivitas pelayanan publik dan perlu diatasi melalui penjadwalan kegiatan yang lebih proporsional dan percepatan proses administrasi pencairan.
- c. **Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah**
Laporan keuangan daerah, masih terdapat koreksi dari auditor eksternal menunjukkan pentingnya penguatan akuntansi berbasis akrual pada LK OPD.
- d. **Tertib Administrasi dan Tata Kelola Aset Daerah**
Permasalahan seperti aset belum bersertifikat, data aset yang belum valid, dan rendahnya pemanfaatan aset untuk pendapatan daerah menandakan pengelolaan aset perlu ditingkatkan.
- e. **Pengelolaan Kas Daerah yang Efektif dan Efisien**
Kurang optimalnya capaian realisasi dengan proyeksi pendapatan asli daerah sehingga mengakibatkan gap antara ketersediaan anggaran dan belanja.
- f. **Tata Kelola Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Transparan**
Masih terdapat kendala berkaitan dengan pengolaan keuangan daerah yang akuntabel yang dikarenakan pelaksanaan pertanggung jawaban belanja oleh OPD sering kali tidak sesuai dengan ketentuan. Keterbukaan informasi publik belum bisa diakses oleh Masyarakat secara luas pada akun media sosial,

masih terbatas pada website pemerintah daerah, website BPKAD, dan Instagram BPKAD.

g. Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi

Belum semua kapasitas SDM di bidang keuangan dan aset, belum memanfaatkan aplikasi seperti SIPD, SIMDA, dan SimAset.

h. Peningkatan Kepatuhan OPD terhadap Ketentuan Pelaporan Keuangan dan Aset

Masih banyak OPD yang menugaskan personil untuk menjadi pengurus barang sebagai pilihan akhir dan belum tertib menyampaikan laporan keuangan dan data aset tepat waktu dikarenakan tidak patuh pada regulasi.

Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan Sekretariat

- a. Keterlambatan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan
- b. Belum optimalnya evaluasi Program dan Kegiatan
- c. Pendataan dan pembinaan kepegawaian masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi secara digital
- d. Rotasi Pegawai yang sangat jarang dilaksanakan
- e. Keterbatasan pelatihan dan pengembangan SDM

2. Permasalahan Bidang Anggaran

- a. Terdapat inkonsistensi antara regulasi, kepentingan politik anggaran, dan kebijakan pemerintah daerah sehingga menimbulkan ketidaksesuaian RKA dengan KUA-PPAS
- b. Sering Terjadi Revisi Anggaran di sepanjang Tahun Anggaran yang disebabkan oleh faktor eksternal

3. Permasalahan Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi

- a. Belum semua laporan keuangan perangkat daerah disampaikan tepat waktu
- b. Kualitas Laporan Keuangan OPD belum optimal
- c. Pencatatan dan rekonsiliasi data pajak tidak dilakukan secara periodik oleh OPD.

4. Permasalahan Bidang Pengelolaan Aset Daerah

- a. Pemanfaatan aset belum optimal
- b. Masih rendahnya kesadaran pejabat/pegawai pengelola BMD terhadap pentingnya pengelolaan BMD

Rencana Kerja Tindak Lanjut

Berkaitan dengan isu strategis dan permasalahan yang ada pada BPKAD akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

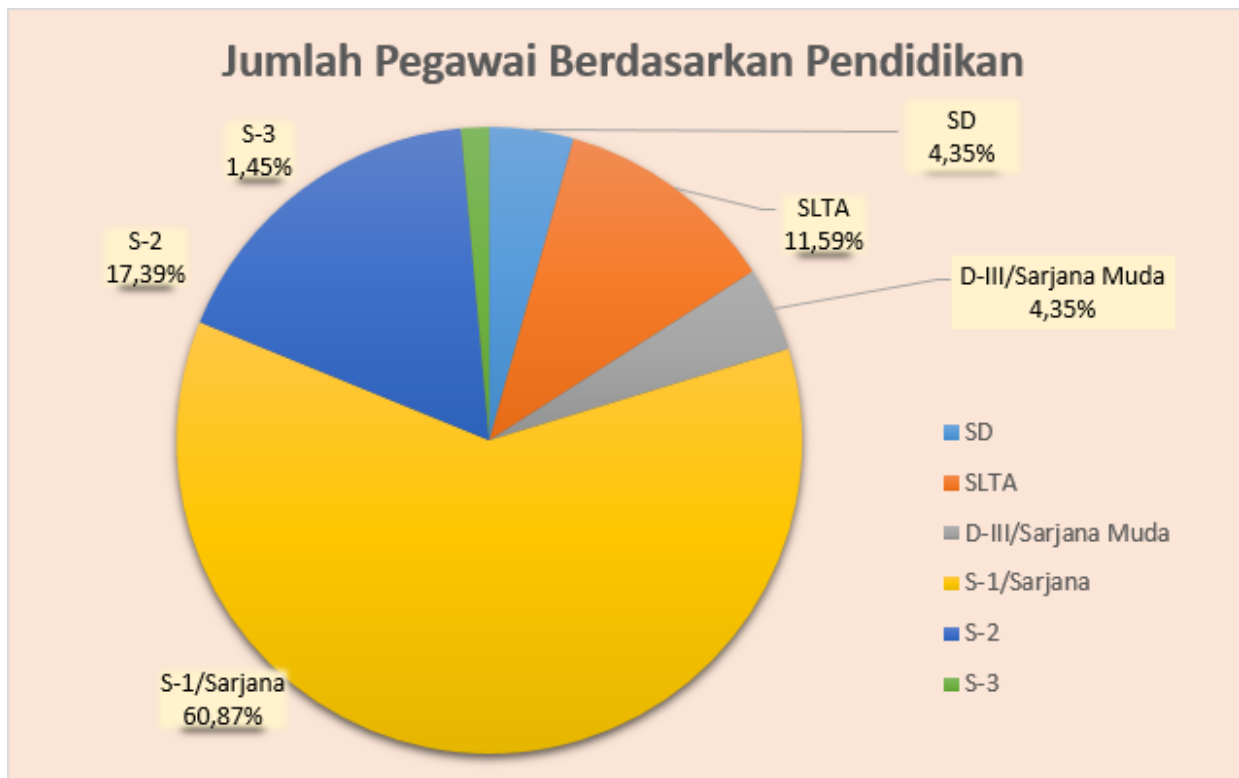
1. Perlu adanya dukungan penguatan peran BPKAD oleh TAPD dan Badan Anggaran DPRD serta kebijakan pimpinan daerah dalam pengendalian kualitas dokumen anggaran dan peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah
2. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia, dan integrasi sistem informasi keuangan secara menyeluruh
3. Perlunya reformasi pengelolaan aset berbasis sistem informasi yang terintegrasi dan berbasis hukum.
4. Perlunya sistem pengelolaan kas yang adaptif, pemanfaatan teknologi informasi, dan evaluasi terhadap rekening kas milik daerah secara berkala.
5. Akuntabilitas belanja pemerintah mendorong BPKAD untuk membangun sistem pelaporan dan pelacakan keuangan yang lebih transparan, baik untuk pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
6. Pelatihan berkelanjutan dan peningkatan infrastruktur digital.
7. Perlu mekanisme monitoring dan evaluasi yang tegas serta pemberian sanksi administratif yang efektif.

D. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

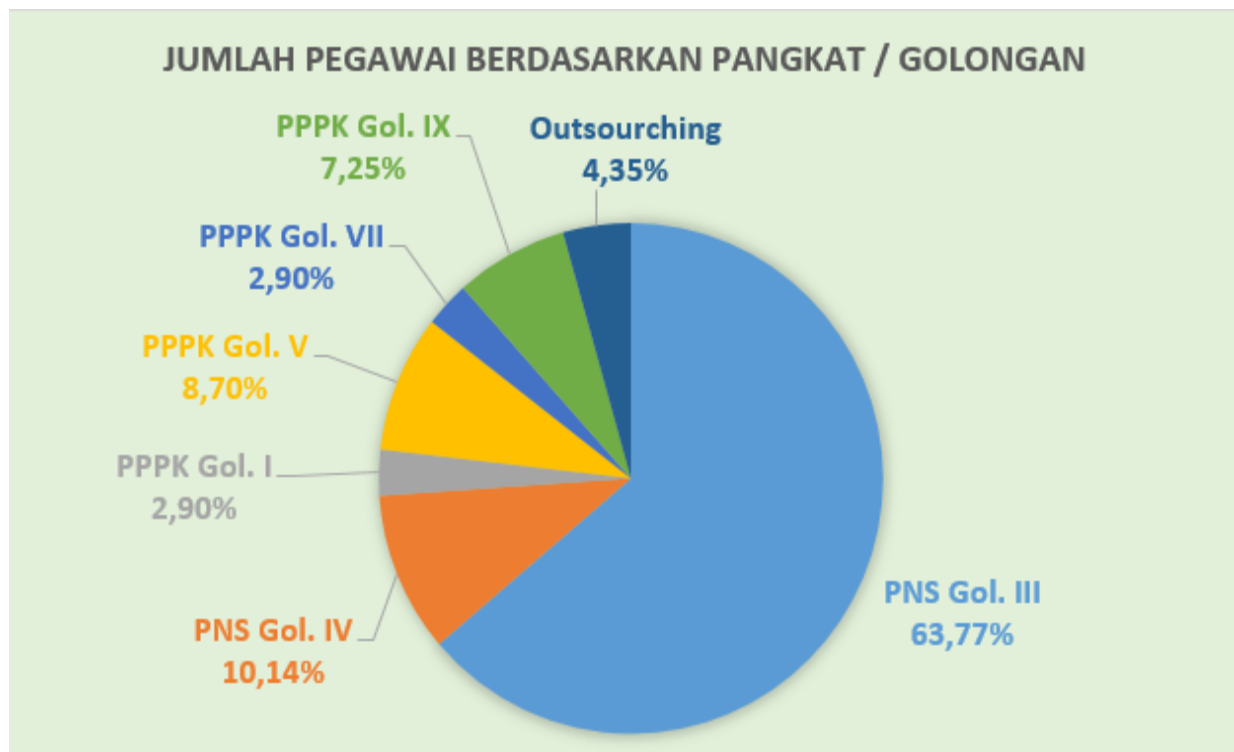
Sumber Daya Manusia pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sampai bulan Desember 2025 sebanyak 69 orang yang terdiri dari 50 orang PNS, 16 orang PPPK, 1 orang PPPK Paruh Waktu dan 2 Tenaga Outsourcing. Adapun kondisi Sumber Daya Manusia selengkapnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025**

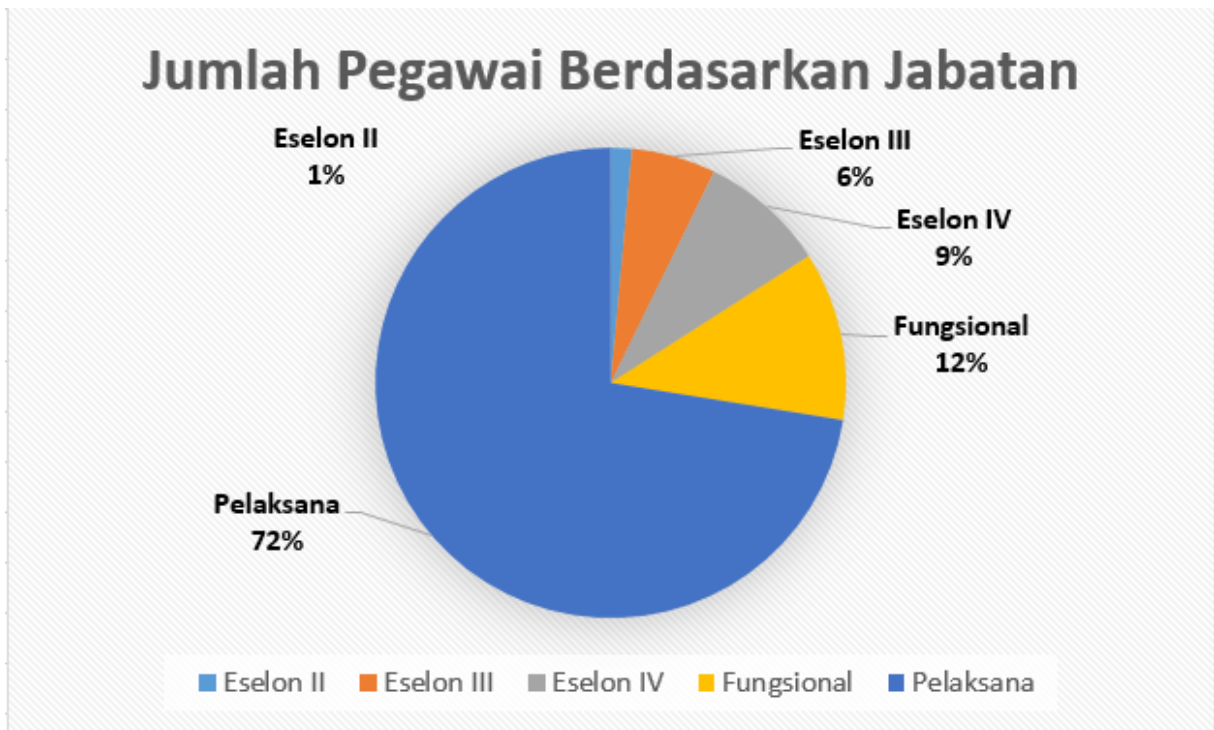
NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI ASN	KETERANGAN
1	Berdasarkan pendidikan :		Jumlah Tenaga Kebersihan :
	- SD	3	➤ 2 Orang L : 2 P : --
	- SMP	-	Jumlah Supir :
	- SLTA	8	➤ 1 Orang L : 1 P : --
	- D III	3	
	- S 1 / D 4	42	
	- S 2	12	
	- S 3	1	
2	Berdasarkan Pangkat / golongan :		
	- Golongan I	-	
	- Golongan II	-	
	- Golongan III	44	
	- Golongan IV	7	
	- Kelas Jabatan 1 PPPK	2	
	- Kelas Jabatan 5 PPPK	6	
	- Kelas Jabatan 7 PPPK	2	
	- Kelas Jabatan 9 PPPK	6	
	- PPPK Paruh Waktu	1	
	- Outsourcing	2	
	Berdasarkan Jabatan :		
	- Eselon II	1	
	- Eselon III	4	
	- Eselon IV	6	
	- Fungsional	8	
	- Pelaksana	50	
	Berdasarkan jenis kelamin		
	- Laki-laki	31	
	- Perempuan	38	



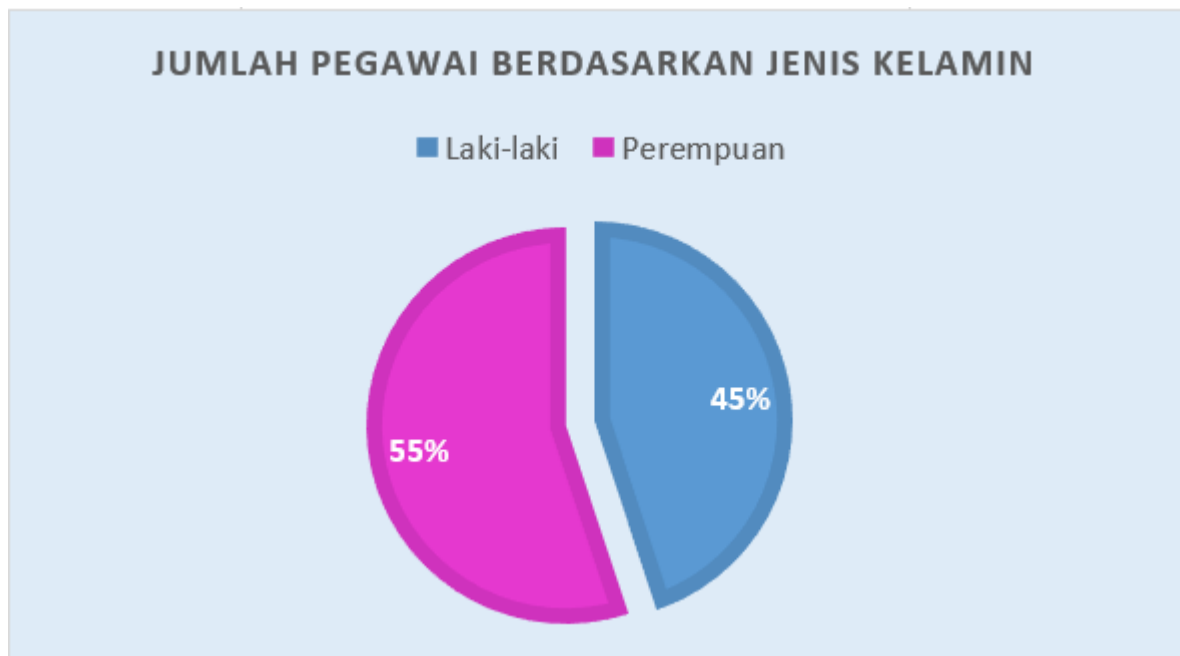
Gambar 1.14 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan



Gambar 1.15 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat / Golongan



Gambar 1.16 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan



Gambar 1.17 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Komposisi pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kendal menunjukkan adanya keseimbangan dan kecenderungan proporsional berbasis gender, sebagaimana tergambar dalam

bagian jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin. Dari total pegawai BPKAD, 55% merupakan pegawai perempuan dan 45% merupakan pegawai laki-laki. Komposisi ini mencerminkan bahwa BPKAD telah memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan dan laki-laki dalam pengelolaan sumber daya manusia.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip Pengarusutamaan Gender (PUG) telah diimplementasikan secara nyata dalam tata kelola kepegawaian BPKAD, khususnya dalam aspek penerimaan, penempatan, dan pengembangan sumber daya manusia. Tidak terdapat dominasi gender tertentu yang berpotensi menimbulkan kesenjangan akses maupun partisipasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Selain itu, proporsi pegawai perempuan yang relatif lebih besar juga menjadi potensi strategis dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi keuangan dan pengelolaan aset daerah, melalui penguatan nilai-nilai ketelitian, akuntabilitas, dan profesionalisme. BPKAD memastikan bahwa baik pegawai perempuan maupun laki-laki memiliki hak, peran, dan kesempatan yang sama dalam pengembangan kompetensi, promosi jabatan, serta keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan komposisi pegawai yang relatif seimbang tersebut, BPKAD Kabupaten Kendal berkomitmen untuk terus mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap kebijakan dan pelaksanaan program, sehingga mendukung terwujudnya lingkungan kerja yang inklusif, adil, dan responsif gender, sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta kebijakan nasional Pengarusutamaan Gender.

Tabel 1.2 Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan

No	Sarpras	Jumlah	Satuan
1.	Mobil	8	Unit
2.	Sepeda Motor	29	Unit
3.	Kamera	1	Unit
4.	LCD Proyektor	6	Unit
5.	Wireless	3	Unit
6.	Pesawat Telepon	6	Unit
7.	Faksimile	1	Unit
8.	Komputer / PC	55	Unit
9.	Printer	44	Unit
10.	Printer Barcode	3	Unit

No	Sarpras	Jumlah	Satuan
11.	Scanner Barcode	2	Unit
12.	UPS	17	Unit
13.	Brankas	6	Unit
14.	AC	24	Unit
15.	Penghancur Kertas	4	Unit
16.	Filling Kabinet	40	Unit
17.	Mesin Ketik	2	Unit
18.	Sound Sistem	3	Unit
19.	Kipas Angin	2	Unit
20.	Server	8	Unit
21.	Meja Kerja	80	Unit
22.	Kursi Lipat	100	Unit
23.	Handy Cam	1	Unit
24.	Lemari Es	2	Unit
25.	APAR	5	Unit
26.	Televisi	3	Unit
27.	Penghisap Debu	2	Unit
28.	Genset	1	Unit
29.	Mesin Penghitung Uang	1	Unit
30.	Lemari Besi/metal	4	Unit
31.	Rak besi/metal	30	Unit
32.	Dispenser	5	Unit
33.	Laptop	20	Unit
34.	IPAD	5	buah
35.	Scanner	10	buah
36.	Kursi plat besi	7	buah
37.	Kursi kayu	5	buah
38.	Kursi putar	25	buah
39.	Papan pengumuman	2	buah
40.	Papan flip Chart	1	buah

E. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kendal selama Tahun 2025. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2025 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) Tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Dengan pola pikir seperti

ini, sistematika penyajian LKjIP Tahun 2025 ini dapat diilustrasikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas gambaran umum tentang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP Tahun 2025 ini.

BAB II Perencanaan Kinerja, menjelaskan muatan Rencana Strategik Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal untuk periode 2021 - 2026 dan Rencana Kinerja untuk tahun 2025.

BAB III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal dikaitkan dengan pertanggung jawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2025.

Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi atau tugas-tugas lainnya.

BAB IV Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

F. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025

Tabel 1.3 Tindak Lanjut atas LHE SAKIP Tahun 2025

No	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Meningkatkan koordinasi dan asistensi dengan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kendal dan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal terkait dengan dokumen perencanaan beserta pelaporannya dalam rangka mendukung tercapainya target kinerja yang diperjanjikan, pengendalian penyusunan capaian kinerja secara	

No	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
	periodik sehingga menghasilkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berkualitas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, masih dijumpai kelemahan-kelemahan sebagai berikut: a. Belum menampilkan tabel anggaran program / kegiatan OPD tahun 2024 secara menyeluruh; b. Pada tabel 2.4 belum menampilkan anggaran pada masing-masing kegiatan; c. Pada Instrument Pendukung Capaian Kinerja belum menampilkan aplikasi-aplikasi yang mendukung hasil kinerja perangkat daerah seperti (si-EVA, SIMPOK, E-SAKIP, ESR.Kemenpan, E-Kin, E-Simpeg);	a. Dalam membuat LKjIP, kami memperhatikan format dari Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kendal. Namun setelah direviu, kami akan memperbaiki LKjIP sesuai hasil reviu dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal; Link : https://drive.google.com/file/d/1d6meiJNxuH-6zCDfQc-9if0-n97BnGW/view?usp=drive_link b. Pada LKjIP telah direvisi pada tabel 2.4 telah menampilkan target penetapan, target perubahan, anggaran penetapan dan anggaran perubahan; Link : https://drive.google.com/file/d/1d6meiJNxuH-6zCDfQc-9if0-n97BnGW/view?usp=drive_link c. Sudah ditambahkan instrument pendukung capaian kinerja dengan menampilkan aplikasi-aplikasi yang mendukung hasil kinerja perangkat daerah; Link: https://drive.google.com/file/d/1NQcaZtWJlqhbbJWtEilnojUvJliA77SY/view?usp=drive_link

No	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
	d. Pada Bab IV Penutup belum dilegalisasi tanda tangan Kepala OPD.	Link : https://drive.google.com/file/d/16NUbyujAS-KziyOuE9pdtZ3Z-AhDvDge/view?usp=drive_link
2.	Meningkatkan koordinasi secara berjenjang terkait tindak lanjut hasil rekomendasi LHE Reviu APIP dan segera menindaklanjuti dengan membuat laporan tindak lanjut dan mengirimkan ke Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal sebelum membuat atau penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada tahun berikutnya	Mengirimkan laporan tindak lanjut hasil rekomendasi LHE Reviu APIP dan mengirimkan ke Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal segera setelah Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) diterima. Link: https://drive.google.com/drive/folders/10pnXgSL2WAc1oiL6T77uYi0kWIC6G-J?usp=drive_link

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

1. Visi

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kendal terpilih periode tahun 2021-2026 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah:

"Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan"

Kata-kata kunci dari visi ini adalah: (1) Handal, (2) Unggul, (3) Makmur, (4) Berkeadilan. Penjelasan unsur visi menggunakan konsep dari Bupati terpilih 2021- 2026. Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan indikasi keberhasilan pencapaian visi daerah, dan menjadi pedoman stakeholder terkait, untuk merumuskannya ke dalam rencana kerja pembangunan sektoral dan kewilayahan.

Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya.

1) KENDAL HANDAL : adalah suatu kondisi terwujudnya Kabupaten Kendal sebagai Pusat Industri dan Pariwisata Jawa Tengah yang mandiri, berprestasi, berdayasaing serta berwawasan lingkungan

2) UNGGUL : adalah suatu kondisi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, religius, berbudaya, sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan serta siap menghadapi revolusi industri 4.0

3) MAKMUR : adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, dengan upaya mendorong pertumbuhan, fasilitasi dan perlindungan bagi pelaku ekonomi, industri kreatif, UMKM berbasis potensi lokal

4) BERKEADILAN : memiliki arti pemerataan pembangunan berbasis pengembangan wilayah yang ditopang tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, melayani dan partisipatif

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kendal terpilih periode tahun 2025-2029 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah: **"Bersama Membangun Kendal Semakin Maju, Sejahtera, Adil, Makmur, Lestari dan Berkelanjutan"**

Dalam rumusan visi ini terkandung tiga rumusan pokok visi yakni **"Maju, Sejahtera-Makmur-Adil, Lestari dan Berkelanjutan"**. Ketiga rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Adapun penjabaran makna pokok visi RPJMD Kabupaten Kendal 2025-2029 dijelaskan sebagai berikut :

1. **Maju**, Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang terus tumbuh secara berkelanjutan sehingga dapat memajukan pembangunan Kabupaten Kendal diiringi dengan reformasi birokrasi pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik yang handal.
2. **Sejahtera, Makmur dan Adil**, Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Kendal yang berdaya saing dengan disertai peningkatan kualitas tenaga kerja yang berkualitas.
3. **Lestari dan Berkelanjutan**, terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kendal dengan mengedepankan kelestarian lingkungan sehingga tercipta pembangunan daerah yang berkelanjutan.

2. Misi

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan Industri Kecil dan Menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (start up);

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi industri 4.0;
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif. ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman, tenteram dalam relasi seimbang antara berbagai komponen masyarakat dan stakeholder pembangunan;
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mendukung pencapaian misi ke-5 yaitu : *Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.*

Sedangkan misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD Kabupaten Kendal 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Sesuai Kompetensi, Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Kendal sebagai subjek utama dalam pembangunan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- b. Tata Kelola Pemerintah yang Efektif, Akuntabel, Inklusif, Reformasi birokrasi merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kendal berkomitmen untuk membangun tata kelola pemerintah yang efektif, akuntabel, dan inklusif

- c. Pengembangan Infrastruktur Desa Berbasis Lingkungan, Pemenuhan kebutuhan sarana infrastruktur khususnya di daerah pedesaan berbasis lingkungan
- d. Pemberdayaan Sektor Perikanan, Pertanian, dan Ekonomi Masyarakat, Sektor perikanan dan pertanian merupakan potensi Kabupaten Kendal yang dapat dioptimalkan melalui pemberdayaan kelompok masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
- e. Penciptaan Lapangan Pekerjaan dan Kesempatan Usaha yang Luas, Ketersediaan lapangan kerja yang memadai bagi masyarakat Kabupaten Kendal dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mendukung pencapaian misi ke-2 yaitu: *Tata Kelola Pemerintah yang Efektif, Akuntabel, Inklusif*. Dengan tujuan kedua dalam RPJMD yaitu: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani. Dan sasaran dalam RPJMD yaitu: Meningkatnya kualitas efektivitas tata kelola dan pelayanan.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Kepala Daerah Tahun 2021-2026, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kendal perlu menetapkan tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah, serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kendal.

3. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan Jangka Menengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kendal

Dalam RPJMD tahun 2021-2026 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mendukung pencapaian misi ke-5 yaitu : *Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel,*

berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan. Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah : Meningkatkan reformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik dengan sasaran : Meningkatnya birokrasi yang akuntabel.

Tujuan yang ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah

Dalam RPJMD tahun 2025-2029 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mendukung pencapaian misi ke-2 yaitu: **Tata Kelola Pemerintah yang Efektif, Akuntabel, Inklusif.** Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah: **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani** dengan sasaran: **Meningkatnya kualitas efektivitas tata kelola dan pelayanan.** Berdasarkan

Tujuan yang ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

b. Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kendal

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Sasaran yang ditetapkan sebagai upaya pencapaian dari tujuan yang telah ditetapkan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengelolaan, keuangan dan pemanfaatan aset daerah
2. Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah

Adapun sasaran yang ditetapkan sebagai upaya pencapaian dari tujuan yang telah ditetapkan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas laporan keuangan

Indikator: Opini BPK

2. Meningkatnya temuan pemeriksaan BMD yang ditindaklanjuti

Indikator: Persentase tindak lanjut temuan pada laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terkait BMD

3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

Indikator: Nilai SAKIP

Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kendal beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 2.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Kendal Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah		OpiniBadan Pemeriksaan Keuangan (BPK)	Hasil audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh BPK RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	meningkatnya pengelolaan, keuangan dan pemanfaatan aset daerah	IPKD (Indek Pengelolaan Keuangan Daerah)	IPKD dihitung berdasarkan evaluasi terhadap Kepatuhan, Kualitas Perencanaan dan Penganggaran, Efektivitas dan Efisiensi Penganggaran, Transparansi dan Akuntabilitas, serta Opini BPK yang dinilai oleh Bapeda Provinsi	rentang IPKD	0	79,325	79,326	79,327	79,328	79,329	79,330
	Meningkatnya akuntabilitas Perangkat daerah	Nilai SAKIP	Penilaian Akuntabilitas Kinerja Keuangan Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat.	Nilai	82,29	82,30	82,31	82,32	82,33	82,34	82,35

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Kendal Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan/ Sasaran RPJMD	Tujuan/ Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VISI: Bersama Membangun Kendal Semakin Maju, Sejahtera, Adil, Makmur, Lestari dan Berkelanjutan												
MISI 2: Tata Kelola Pemerintah yang Efektif, Akuntabel, Inklusif Pokok Visi: MAJU	Tujuan 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani											
	Sasaran: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.											
		Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	IPKD (Indek Pengelolaan Keuangan Daerah)	IPKD dihitung berdasarkan evaluasi terhadap Kepatuhan, Kualitas Perencanaan dan Penganggaran, Efektivitas dan Efisiensi Penganggaran, Transparansi dan Akuntabilitas, serta Opini BPK yang dinilai oleh Bapeda Provinsi	Poin	76,329	76,83	77,34	78,35	79,06	79,5	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan/ Sasaran RPJMD	Tujuan/ Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Meningkatnya kualitas laporan keuangan	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Hasil audit terhadap LKPD oleh BPK RI	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
		Meningkatnya temuan pemeriksaan BMD yang ditindaklanjuti	Persentase Tindak Lanjut Temuan Pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terkait BMD	[(Jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti / Total rekomendasi terkait BMD dalam LHP BPK)x100%]	%	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP	Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan oleh Inspektorat.	nilai	82,34	82,35	82,36	82,37	82,38	82,39	

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan akan menjadi landasan kritis dalam merancang strategi. Sementara itu arah tindakan yang diambil dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran menjadi arah kebijakan, karena hal tersebut akan dijadikan pedoman atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan tujuan.

Strategi dan kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk merumuskan strategi dan kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang perlu diperhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh.

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kendal sesuai Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah			Opini BPK	WTP	WTP
		1.1	Meningkatnya pengelolaan, keuangan dan pemanfaatan aset daerah	IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	Rentang IPKD	100 %
		1.2	Meningkatnya akuntabilitas Perangkat daerah	Nilai SAKIP	Predikat SAKIP	100 %

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah	1. Meningkatnya pengelolaan, keuangan dan pemanfaatan aset daerah	Melakukan inventarisasi dan penilaian secara menyeluruh terhadap seluruh aset daerah untuk mengetahui potensi dan kondisi aset yang ada, serta menentukan pemanfaatannya secara optimal	Pengembangan Kebijakan Pengelolaan Aset yang Berkelanjutan
			Optimalisasi Pemanfaatan Aset untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah
		Peningkatan kualitas laporan keuangan / LKPD sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah)	Penyusunan Laporan Keuangan yang Akurat dan Tepat Waktu
			Kepatuhan terhadap Regulasi dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
	2. Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Peningkatan transparansi anggaran melalui website atau media elektronik yang lain	Penyediaan Informasi yang Jelas dan Terbuka dengan Pembaruan Informasi secara Berkala
			Menerbitkan laporan hasil audit dan evaluasi penggunaan anggaran oleh badan pemeriksa keuangan (BPK) atau lembaga pengawasan lainnya melalui media elektronik
			Meningkatkan kompetensi pegawai melalui pelatihan dan pendidikan yang relevan dengan pengelolaan keuangan, akuntansi, audit, serta pengelolaan aset negara.
			Mengembangkan jejaring dengan instansi terkait seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kementerian Keuangan guna mendukung pengawasan dan pembinaan SDM

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Peningkatan kinerja dan peningkatan disiplin serta peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana	Melakukan evaluasi terhadap sarana dan prasarana yang ada, serta mengidentifikasi kebutuhan yang mendesak untuk mendukung kelancaran operasional Menyusun kebijakan yang memastikan sinergi antara peningkatan kinerja, disiplin, dan kualitas sarana-prasarana. Sarana dan prasarana yang baik akan mendukung pegawai dalam melaksanakan tugas mereka secara efektif, sementara kinerja dan disiplin yang tinggi akan mendorong penggunaan sarana-prasarana secara optimal

Dalam rangka mendukung pencapaian Misi ke-2 Kabupaten Kendal : ***Tata Kelola Pemerintah yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif***, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal menetapkan strategi pembangunan perangkat daerah sesuai Renstra tahun 2025–2029 sebagai berikut :

1. Strategi Penguatan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja serta prioritas pembangunan daerah
 - a. Sinkronisasi dokumen perencanaan, penganggaran, dan kinerja perangkat daerah
 - b. Penguatan verifikasi dan asistensi penyusunan RKA berbasis outcome
 - c. Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terintegrasi
2. Strategi Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah
 - a. Memperkuat penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam penyusunan laporan keuangan.
 - b. Meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan agar meraih dan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

- c. Mengembangkan sistem pelaporan keuangan berbasis teknologi informasi yang lebih mudah diakses, transparan, dan tepat waktu.
- 3. Strategi Digitalisasi dan Integrasi Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - a. Optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan.
 - b. Integrasi data keuangan daerah dengan sistem nasional untuk meningkatkan keterhubungan, akurasi, dan transparansi.
 - c. Pengembangan inovasi layanan berbasis teknologi informasi dalam bidang keuangan dan aset daerah.
- 4. Strategi Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Dana Transfer dan Dana Desa
 - a. Meningkatkan koordinasi, fasilitasi, dan asistensi dalam penyaluran dana perimbangan, bagi hasil pajak, retribusi, dan dana desa.
 - b. Memperkuat monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana transfer agar tepat sasaran dan mendukung pembangunan daerah.
 - c. Menyusun pedoman teknis pengelolaan dana transfer untuk meningkatkan kepatuhan regulasi.
- 5. Strategi Penataan dan Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)
 - a. Melaksanakan inventarisasi, penatausahaan, sertifikasi, serta pemetaan nilai ekonomis aset daerah.
 - b. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang idle atau kurang produktif menjadi sumber penerimaan daerah.
 - c. Menyusun mekanisme pemeliharaan dan penghapusan aset daerah secara tertib sesuai peraturan.
- 6. Strategi Peningkatan Kualitas dan Validitas Data Aset Daerah Berbasis Aplikasi
 - a. Pemutakhiran dan rekonsiliasi data aset secara berkala melalui aplikasi BMD
 - b. Validasi dan verifikasi data aset berbasis dokumen sumber
 - c. Penguatan kapasitas SDM serta pengendalian internal pengelolaan data aset

7. Strategi Percepatan Penyelesaian Hasil Pemeriksaan
 - a. Penguatan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan antar perangkat daerah
 - b. Monitoring progres tindak lanjut secara berkala dan berbasis aplikasi
 - c. Pendampingan teknis penyelesaian temuan pemeriksaan
8. Strategi Penguatan Sistem Pengendalian Intern dan Manajemen Risiko
 - a. Mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara menyeluruh di lingkungan BPKAD.
 - b. Menyusun manajemen risiko pengelolaan keuangan dan aset untuk mengurangi potensi penyimpangan.
 - c. Meningkatkan fungsi monitoring, evaluasi, dan audit internal terhadap kinerja pengelolaan keuangan.
9. Strategi Penguatan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Kepegawaian
 - a. Meningkatkan efisiensi pembayaran gaji, tunjangan, dan layanan keuangan lainnya agar tepat waktu dan akurat.
 - b. Menyediakan dukungan administrasi operasional perangkat daerah secara optimal.
 - c. Menerapkan standar pelayanan minimal dalam administrasi keuangan yang transparan dan responsif.
10. Strategi Pengembangan Kapasitas dan Integritas SDM
 - a. Melaksanakan pendidikan, pelatihan, serta bimbingan teknis untuk meningkatkan kompetensi aparatur.
 - b. Membangun budaya kerja yang berintegritas, ikhlas, tuntas, serta berorientasi pada pelayanan publik.
 - c. Memberdayakan SDM untuk menguasai teknologi informasi di bidang keuangan dan aset.
11. Strategi Inovasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - a. Mengembangkan inovasi pelayanan publik berbasis digital dalam bidang keuangan dan aset.
 - b. Menyusun standar pelayanan yang sederhana, cepat, transparan, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan.
 - c. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui mekanisme transparansi publik.

**Tabel 2.4 Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029**

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah			IPKD (Indek Pengelolaan Keuangan Daerah)	poin	100%
		1.1	Meningkatnya kualitas laporan keuangan	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	predikat	WTP
		1.2	Meningkatnya temuan pemeriksaan BMD yang ditindaklanjuti	Persentase Tindak Lanjut Temuan Pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terkait BMD	%	100%
		1.3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP	Nilai	100%

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	1. Meningkatkan kualitas laporan keuangan	Penguatan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja serta prioritas pembangunan daerah	Optimalisasi penyusunan dan pelaksanaan APBD melalui penerapan penganggaran berbasis kinerja, penguatan verifikasi RKA perangkat daerah, serta pemanfaatan sistem informasi pengelolaan keuangan terintegrasi guna menjamin efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas anggaran
		Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah	Optimalisasi penerapan SAP berbasis akrual
		Digitalisasi dan Integrasi Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah terintegrasi
		Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Dana Transfer dan Dana Desa	Optimalisasi penyaluran dana berbasis kinerja dan kepatuhan administrasi melalui verifikasi persyaratan penyaluran secara tepat waktu dan akurat.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	2. Meningkatnya temuan pemeriksaan BMD yang ditindaklanjuti	Penataan dan Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	Inventarisasi dan rekonsiliasi data aset secara berkala
		Peningkatan kualitas dan validitas data aset daerah berbasis aplikasi	Optimalisasi aplikasi pengelolaan aset daerah
		Percepatan penyelesaian hasil pemeriksaan	Penyusunan rencana aksi tindak lanjut temuan pemeriksaan
	3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Penguatan Sistem Pengendalian Intern dan Manajemen Risiko	Optimalisasi penerapan SPIP dan manajemen risiko secara terintegrasi dalam seluruh proses pengelolaan keuangan dan aset daerah guna meminimalkan risiko penyimpangan serta meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
		Penguatan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Kepegawaian	Optimalisasi pelayanan administrasi keuangan dan kepegawaian berbasis sistem informasi yang terintegrasi guna meningkatkan ketepatan waktu layanan, tertib administrasi, serta mendukung kinerja aparatur secara efektif dan akuntabel.
		Pengembangan Kapasitas dan Integritas SDM	Peningkatan kompetensi dan integritas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, internalisasi nilai-nilai profesionalisme, serta penguatan budaya kerja berorientasi kinerja dan pelayanan publik.
		Inovasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pengembangan layanan publik yang inovatif, responsif, dan berbasis digital guna meningkatkan kepuasan masyarakat, mempercepat proses pelayanan, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

C. Perjanjian Kinerja

Penetapan Kinerja merupakan ikhtisar kinerja dari rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima amanah/pengemban tugas dan penanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tugas dan tanggung jawab kinerja.

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Renstra 2021-2026

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
	Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini Badan Pemeriksan Keuangan (BPK)	WTP	WTP
1.	Meningkatnya pengelolaan, keuangan dan pemanfaatan aset daerah	Nilai IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	Rentang IPKD	79,329
		Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (Kementerian Keuangan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Kantor Pelayanan Pajak, Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri)	%	100
		Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	%	100
2.	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Predikat SAKIP	82,34

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Renstra 2025-2029

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Nilai IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	Indeks	WTP
1.	Meningkatnya kualitas laporan keuangan	Opini BPK	Predikat	76,329
2.	Meningkatnya temuan pemeriksaan BMD yang ditindaklanjuti	Persentase tindak lanjut temuan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Lporan Keuangan Pemerintah Daerah terkait BMD	%	100
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Poin	82,34

**Tabel 2.7 Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2025**

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Penetapan	Target Perubahan	Anggaran Penetapan	Anggaran Perubahan
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					10.994.604.017	8.378.210.585
		<i>Persentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah</i>	%	100	100		
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun	Dokumen	11	11	93.234.000	92.650.000
	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	34.189.000	42.650.000
	2) Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	8	8	7.115.000	-
	3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	51.930.000	50.000.000
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terbayarnya Gaji dan tunjangan ASN	Bulan	14	14	7.904.967.067	6.477.165.635
	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	37	37	7.904.967.067	6.477.165.635
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terlayani	Orang	61	61	50.000.000	-
	1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20	0	50.000.000	-
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan rutin	Bulan	14	14	1.225.343.450	1.029.069.234
	1) Penyediaan peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan	Paket	3	3	121.908.000	101.908.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Penetapan	Target Perubahan	Anggaran Penetapan	Anggaran Perubahan
	perlengkapan kantor	Perlengkapan Kantor yang Disediakan					
	2) Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	4	22.110.750	2.382.750
	3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	56.820.000	56.820.000
	4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	3	70.491.000	70.527.084
	5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	2.270.000	-
	6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	884.118.400	759.146.900
	7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1000	1000	67.625.300	38.284.500
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah sarana prasarana yang diadakan	Unit	11	11	708.330.000	180.000
	1) Pengadaan Mebel			1	0	83.450.000	-
	2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	5	624.880.000	180.000
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan rutin	Bulan	14	14	580.899.500	537.385.716
	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	20.000.000	12.000.000
	2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	288.204.500	275.204.500
	3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	272.695.000	250.181.216
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang terpelihara	Unit	94	94	431.830.000	241.760.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Penetapan	Target Perubahan	Anggaran Penetapan	Anggaran Perubahan
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	81	81	185.000.000	142.000.000
	2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	12	101.830.000	99.760.000
	3) Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	1	1	145.000.000	-
II.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					429.207.087.656	413.944.802.950
		Persentase kesesuaian APBD dengan KUA PPAS	%	100	100		
8.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dok anggaran daerah yang disusun (KUAPPAS, RKA, RAPBD, APBD, DPA)	Dokumen	5	5	591.443.800	217.860.400
	1) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	2	25.801.500	13.725.750
	2) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	2	28.701.400	14.800.700
	3) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	53	53	22.800.000	6.025.000
	4) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	53	53	16.850.000	3.875.000
	5) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD	Dokumen	1	1	167.955.000	147.975.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Penetapan	Target Perubahan	Anggaran Penetapan	Anggaran Perubahan
	Daerah tentang Penjabaran APBD						
	6) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2	2	42.710.000	27.510.000
	7) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	12	12	286.625.900	3.948.950
		<i>Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (Kemenkeu, KPPN, KPP, Taspen)</i>	%	100	100		
9.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah OPD yang dibina dalam pengelolaan perbendaharaan daerah	OPD	49	49	168.693.000	146.836.500
	1) Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	6	6	106.600.000	101.915.000
	2) Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	184	184	8.665.000	8.495.000
	3) Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	2	2	34.730.000	34.145.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Penetapan	Target Perubahan	Anggaran Penetapan	Anggaran Perubahan
	4) Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	5	5	18.698.000	2.281.500
		<i>Persentase OPD menyusun laporan keuangan sesuai standar keuangan</i>	%	100	100		
10.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah OPD yang dibina dalam penyusunan laporan keuangan	OPD	51	51	150.657.600	74.998.800
	1) Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	79	79	33.289.000	16.889.000
	2) Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	5	5	69.344.800	44.144.800
	3) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	51	51	19.366.000	840.000
	4) Penyusunan Tanggapan / Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan / Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	2	2	2.397.800	750.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Penetapan	Target Perubahan	Anggaran Penetapan	Anggaran Perubahan
	5) Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	2	2	6.707.000	3.825.000
	6) Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota	Orang	31	31	19.553.000	8.550.000
11.	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah desa penerima DD,ADD, bagi hasil pajak dan retribusi	Desa	266	266	428.255.413.256	413.465.107.250
	1) Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	266	266	372.467.105.377	365.867.105.377
	2) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	1	1	15.095.106.424	5.265.986.000
	3) Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	40.693.201.455	42.332.015.873
		<i>Persentase sistem keuangan yang terintegrasi</i>	%	50	50		
12.	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Data Base Sistem Informasi Keuangan yang terpelihara	Laporan	2	2	40.880.000	40.000.000
	1) Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	2	2	40.880.000	40.000.000
III.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					1.890.726.000	1.215.611.500
		<i>Persentase aset daerah yang dikelola dengan baik</i>	%	100	100		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Penetapan	Target Perubahan	Anggaran Penetapan	Anggaran Perubahan
13.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dikelola	%	100	100	1.890.726.000	1.215.611.500
	1) Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	1	1	155.500.000	144.787.500
	2) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	2	2	10.750.000	6.125.000
	3) Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	1	844.561.000	260.320.000
	4) Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	1	1	79.620.000	78.995.000
	5) Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	5	5	559.880.000	544.100.000
	6) Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	12	12	240.415.000	181.284.000
JUMLAH						442.092.417.673	423.538.625.035

D. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Instrumen pendukung capaian kinerja pada perangkat daerah berfungsi untuk memastikan bahwa perangkat daerah dalam pemerintahan daerah dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis, serta mendukung sistem akuntabilitas kinerja yang transparan dan efektif. Berikut adalah beberapa instrumen yang mendukung capaian kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal :

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)

Renstra PD adalah dokumen perencanaan yang mengatur arah kebijakan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah dalam periode tertentu (umumnya lima tahun). Renstra BPKAD tahun 2021 – 2026 menjadi acuan untuk menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal. Dan Renstra BPKAD tahun 2025 – 2029 menjadi acuan untuk menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal pada anggaran perubahan.

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana perangkat daerah mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal memiliki IKU yang relevan dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya. IKU Tahun 2021-2026 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPKAD Ka. Kendal Nomor : 900/14/2022 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kendal, dan IKU Tahun 2025-2029 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPKAD Ka. Kendal Nomor : 900/33/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kendal.

3. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)

Renja PD adalah dokumen tahunan yang menguraikan rencana kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan prioritas dan sasaran Renstra PD. Renja PD ini memuat kegiatan, target, anggaran, serta indikator pencapaiannya.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD merupakan instrumen penting yang digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam Renja PD. Anggaran ini harus disusun dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas agar dapat mendukung pencapaian kinerja yang optimal.

5. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

LKjIP adalah laporan yang dibuat oleh perangkat daerah untuk menggambarkan pencapaian kinerja selama periode tertentu (biasanya tahunan). Laporan ini mencakup hasil pencapaian terhadap indikator kinerja, serta analisis dan evaluasi atas keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

6. Pengendalian Internal dan Forum Evaluasi Kinerja

Pengendalian internal, yang termasuk dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), berfungsi untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dilaksanakan dengan efisien dan efektif. Pengendalian ini juga memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran.

Forum evaluasi kinerja dilakukan secara periodik untuk membahas perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan serta mengevaluasi kendala yang dihadapi. Melalui forum ini, dapat diidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan capaian kinerja.

7. Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah

Pengembangan kapasitas aparatur melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan kompetensi merupakan faktor penting dalam meningkatkan kinerja perangkat daerah. Aparatur yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai akan lebih efektif dalam menjalankan tugas dan mencapai sasaran.

8. Aplikasi si-Eva

Aplikasi SIEVA adalah sebuah sistem atau aplikasi untuk melakukan evaluasi dan monitoring terhadap berbagai layanan, kegiatan, atau perencanaan pemerintahan. Secara umum, SIEVA merupakan singkatan dari Sistem Evaluasi atau Sistem Informasi Evaluasi yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan memantau kinerja pelayanan, program, atau rencana kerja suatu organisasi atau instansi pemerintah.

Aplikasi ini bertujuan untuk :

- Mempermudah pengumpulan data evaluasi
- Memonitor secara real-time kinerja layanan atau kegiatan.
- Menyediakan informasi yang akurat dan terintegrasi untuk pengambilan keputusan.
- Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan publik atau perencanaan

Manfaat SI-EVA bagi BPKAD

a. Evaluasi Kinerja Program & Kegiatan

- Memudahkan BPKAD mengevaluasi capaian kinerja program/kegiatan yang dibiayai APBD.

- Membantu menilai kesesuaian antara perencanaan, penganggaran, dan realisasi.

Relevan untuk evaluasi Renja, RKPD, dan kinerja keuangan SKPD.

b. Monitoring Realisasi Anggaran

- Menyajikan data realisasi keuangan dan kinerja secara periodik (triwulan/tahunan).
- Mengidentifikasi deviasi antara target dan realisasi sejak dini.

Mendukung fungsi BPKAD dalam pengendalian pelaksanaan APBD.

c. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi

- Data evaluasi terdokumentasi secara sistematis dan berbasis aplikasi.
- Mempermudah penyusunan Laporan keuangan, Laporan kinerja (LKjIP), bahan pemeriksaan BPK/APIP

Memperkuat prinsip good governance.

d. Bahan Pengambilan Keputusan Pimpinan

- Menyediakan evidence-based data untuk Penajaman kebijakan anggaran, Perbaikan program/kegiatan, Penentuan prioritas belanja daerah

Sehingga Sangat berguna bagi Kepala BPKAD dan TAPD.

e. Identifikasi Risiko dan Permasalahan Keuangan

- Membantu mendeteksi Kegiatan tidak efektif/inefisien, Program yang berulang namun berdampak rendah, Risiko ketidaksesuaian APBD dengan KUA-PPAS

Hal ini selaras dengan manajemen risiko dan SPI BPKAD.

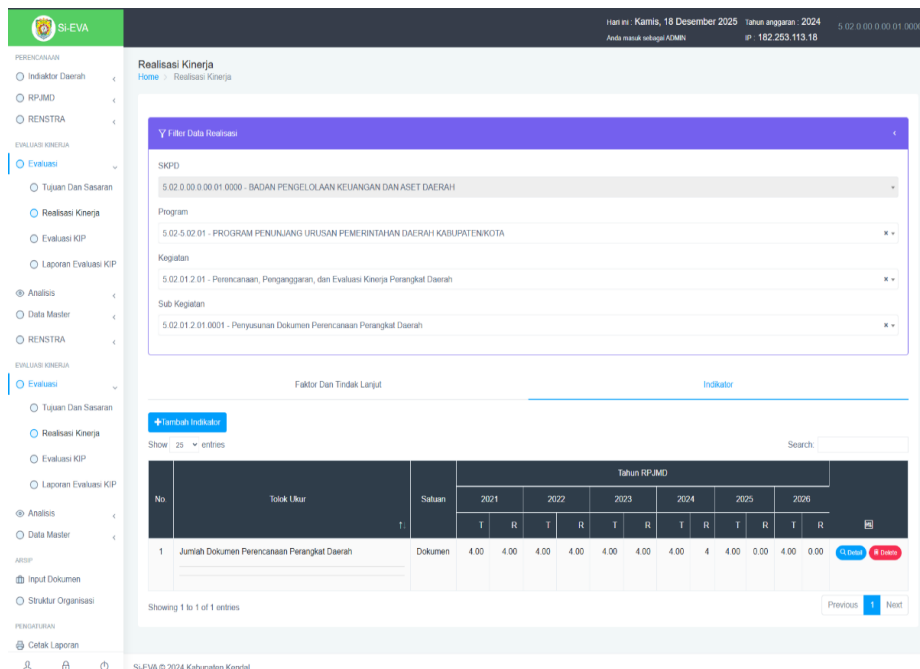
f. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran

- SI-EVA mendukung evaluasi keterkaitan:
RPJMD → RKPD → Renja → APBD
- Mengurangi risiko program tidak berbasis analisis kebutuhan.
Ini penting untuk meningkatkan kualitas belanja daerah.

g. Efisiensi Administrasi dan Pelaporan

- Mengurangi proses manual (Excel/dokumen terpisah).
- Mempercepat rekap data evaluasi lintas bidang Anggaran, Akuntansi & Pelaporan, Aset/BMD, Sistem Informasi Keuangan

Berikut screenshot aplikasi si-Eva :



Gambar 2.1 Aplikasi Si-Eva

9. Aplikasi SIMPOK

Aplikasi SIMPOK biasanya merujuk pada Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Operasi/Operasional Kegiatan yang dipakai oleh pemerintah daerah untuk mengendalikan, memantau, mengelola, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan atau kinerja organisasi/perangkat daerah.

SIMPOK merupakan Sistem Informasi Manajemen yang dirancang untuk membantu pengelolaan dan pengendalian kegiatan (termasuk anggaran, operasional, dan pelaporan) di pemerintahan daerah.

Tujuannya adalah mempermudah monitoring pelaksanaan program/kegiatan setiap unit kerja atau SKPD secara terintegrasi.

Fungsi Utama aplikasi SIMPOK :

- Pemantauan kegiatan per unit kerja/OPD secara real-time.
- Mendukung evaluasi kinerja sebagai dasar pemberian TPP atau insentif lainnya
- Pengendalian anggaran/APBD dan integrasi data dengan sistem lain seperti SIMDA/SIRUP di beberapa daerah.

Manfaat SIMPOK bagi BPKAD:

- a. Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran

SIMPOK membantu BPKAD :

- Memantau realisasi fisik dan keuangan kegiatan OPD secara periodic
- Mengidentifikasi deviasi antara perencanaan dan pelaksanaan
- Mendukung fungsi pengendalian APBD agar sesuai KUA-PPAS dan DPA

Sangat relevan untuk penguatan fungsi budget control BPKAD.

b. Monitoring Kinerja Perangkat Daerah

Bagi BPKAD sebagai OPD teknis :

- SIMPOK menyediakan data capaian kinerja program dan kegiatan
- Menjadi bahan evaluasi kinerja OPD (triwulan/semester/tahunan)
- Mendukung penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) dan evaluasi internal

c. Mendukung Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Data SIMPOK dapat digunakan sebagai :

- Referensi ketercapaian output kegiatan
- Pendukung rekonsiliasi antara pelaksanaan kegiatan dan realisasi keuangan
- Bahan analisis dalam penyusunan laporan keuangan daerah

d. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data

SIMPOK membantu BPKAD :

- Mengintegrasikan data kinerja dengan OPD lain
- Memperkuat koordinasi antara perencanaan – pelaksanaan – pelaporan
- Mengurangi laporan manual dan duplikasi data

e. Alat Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Pimpinan

Bagi Kepala BPKAD dan TAPD :

- SIMPOK menyajikan dashboard kinerja dan progres kegiatan
- Mempermudah early warning system terhadap kegiatan bermasalah
- Menjadi dasar rekomendasi kebijakan dan perbaikan kinerja

f. Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas

Dengan pencatatan berbasis system :

- Proses pelaksanaan kegiatan lebih terlacak
- Mengurangi risiko administrasi tidak tertib

- Mendukung prinsip good governance

Berikut screenshoot aplikasi SIMPOK:

Executive Summary (EIS) - Peringkat

Peringkat SKPD Berdasarkan Realisasi Keuangan

Peringkat	SKPD	Realisasi			
		Keuangan (Rp.)	(%)	Fisk (%)	(%) Tertimbang
81	7.010.000.000.01.0007 - KELURAHAN KALIBUNTUWATAN	44.625.000,00	20,28	0,00	0,00
82	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BAGAN PENGELAAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	82.611.552.547,00	19,51	0,00	0,00
83	1.02.0.00.0.00.01.0001 - RUMAH SAKIT LUMUH @ H. SDEWONDO	3.301.981.143,00	2,06	0,00	0,00
84	1.02.0.00.0.00.01.0015 - PUSKESMAS RINGINARUM	0,00	0,00	0,00	0,00
85	1.02.0.00.0.00.01.0014 - PUSKESMAS GEMUH II	0,00	0,00	0,00	0,00
86	1.02.0.00.0.00.01.0015 - PUSKESMAS GEMUH I	0,00	0,00	0,00	0,00
87	1.02.0.00.0.00.01.0010 - PUSKESMAS NGAMPIL	0,00	0,00	0,00	0,00
88	1.02.0.00.0.00.01.0011 - PUSKESMAS PEDANDON	0,00	0,00	0,00	0,00
89	1.02.0.00.0.00.01.0010 - PUSKESMAS BRANGSONG II	0,00	0,00	0,00	0,00
90	1.02.0.00.0.00.01.0009 - PUSKESMAS BRANGSONG I	0,00	0,00	0,00	0,00

Showing 81 to 90 of 113 entries

Fisk

Peringkat SKPD Berdasarkan Realisasi Fisk

Peringkat	SKPD	Realisasi			
		Keuangan (Rp.)	(%)	Fisk (%)	(%) Tertimbang
1	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN	206.846.152.398,00	64,95	0,00	0,00
2	1.02.0.00.0.00.01.0001 - PUSKESMAS PLANTUNGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1.02.0.00.0.00.01.0002 - PUSKESMAS SINGKREJO I	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.02.0.00.0.00.01.0003 - PUSKESMAS SINGKREJO II	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1.02.0.00.0.00.01.0004 - PUSKESMAS PANGERUYUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1.02.0.00.0.00.01.0005 - PUSKESMAS PATEAN	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1.02.0.00.0.00.01.0006 - PUSKESMAS SINGOROCO I	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1.02.0.00.0.00.01.0007 - PUSKESMAS SINGOROCO II	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1.02.0.00.0.00.01.0008 - PUSKESMAS LIMBANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1.012.22.0.00.01.0000 - DINAS PENCIKIDAN DAN KEBUDAYAAN	360.286.339.295,00	41,22	0,00	0,00

Showing 1 to 10 of 113 entries

Gambar 2.2 Aplikasi SIMPOK

10. Aplikasi ESR.Kemenpan-RB

Aplikasi ESR MenPAN-RB adalah Electronic Self Reporting, yaitu aplikasi resmi dari Kementerian PAN dan RB yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk melakukan pelaporan mandiri (self-reporting) terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB).

ESR MenPAN-RB merupakan sistem berbasis elektronik yang memfasilitasi :

- pengisian data
- unggah bukti dukung

- penilaian mandiri atas indikator Reformasi Birokrasi oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

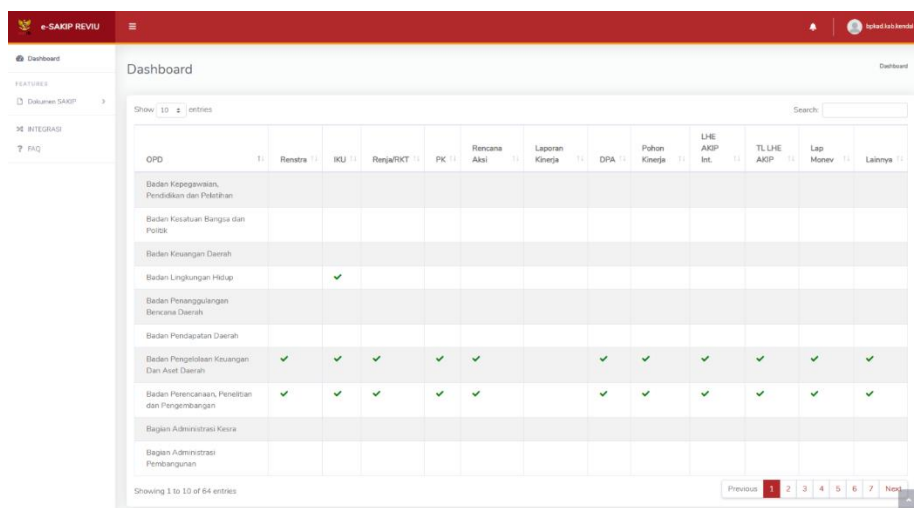
Fungsi utama Aplikasi ESR :

- Pelaporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi
 - RB Umum
 - RB Tematik (misalnya: penurunan kemiskinan, stunting, investasi, belanja produk dalam negeri, dll.)
- Input dan unggah bukti dukung
 - Dokumen kebijakan
 - Laporan kinerja
 - SOP
 - Data pendukung lain sesuai indikator RB
- Penilaian mandiri (self assessment)
 - Instansi menilai capaian indikator RB sebelum diverifikasi oleh evaluator KemenPAN-RB
- Monitoring dan evaluasi
 - Menjadi dasar evaluasi RB oleh KemenPAN-RB
 - Berpengaruh pada Indeks Reformasi Birokrasi
 - Kaitan dengan BPKAD

Dalam konteks BPKAD, ESR biasanya terkait dengan:

- Area Penguatan Akuntabilitas
- Area Penataan Tata Laksana
- Area Manajemen ASN

Berikut screenshoot aplikasi ESR.Kemenpan-RB :



The screenshot shows the 'Dashboard' of the 'e-SAKIP REVU' application. It features a table with 10 columns representing different indicators: OPD, Renstra, RKU, Renja/RKT, PK, Rencana Aksi, Laporan Kinerja, DPA, Pohon Kinerja, LHE AKIP Int., TL LHE AKIP, Lap Monev, and Lainnya. The rows list various organizational units (OPD) such as 'Badan Kependidikan, Pendidikan dan Pelatihan', 'Badan Kesatuan Bangsa dan Politik', 'Badan Keuangan Daerah', 'Badan Lingkungan Hidup', 'Badan Penanggulangan Bencana Daerah', 'Badan Pendapatan Daerah', 'Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah', 'Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan', 'Badan Administrasi Kerja', and 'Badan Administrasi Pembangunan'. Green checkmarks indicate that certain indicators have been completed or are in progress for specific units. For example, 'Badan Lingkungan Hidup' has a checkmark under 'RKU', and 'Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah' has checkmarks under 'Renstra', 'RKU', 'Renja/RKT', 'PK', 'Rencana Aksi', 'Laporan Kinerja', 'DPA', 'Pohon Kinerja', 'LHE AKIP Int.', 'TL LHE AKIP', 'Lap Monev', and 'Lainnya'.

Gambar 2.3 Aplikasi ESR.Kemenpan-RB

11. Aplikasi E-Kinerja ASN

Aplikasi e-Kinerja ASN adalah sistem informasi berbasis elektronik yang digunakan untuk mengelola kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) secara terukur, objektif, dan terdokumentasi, sesuai dengan kebijakan Kementerian PAN dan RB.

e-Kinerja ASN berfungsi untuk :

- perencanaan kinerja ASN
- pelaporan dan penilaian kinerja, serta
- penghitungan capaian kinerja individu, yang terintegrasi dengan kinerja organisasi dan menjadi dasar pemberian TPP/TPP Kinerja.

Fungsi utama aplikasi e-Kinerja :

- a. Perencanaan kinerja individu
 - Penjabaran SKP (Sasaran Kinerja Pegawai)
 - Penurunan kinerja organisasi ke kinerja individu
- b. Pelaporan aktivitas dan output
 - Input kegiatan harian/bulanan
 - Bukti dukung pekerjaan
- c. Penilaian kinerja
 - Penilaian oleh atasan langsung
 - Penilaian perilaku kerja (disiplin, integritas, kerja sama, dll.)
- d. Perhitungan TPP berbasis kinerja
 - Menghitung persentase capaian kinerja
 - Menjadi dasar pembayaran TPP ASN
- e. Monitoring dan evaluasi kinerja
 - Rekap kinerja pegawai, unit, dan perangkat daerah
 - Mendukung SAKIP dan Reformasi Birokrasi

Manfaat e-Kinerja bagi BPKAD :

- Meningkatkan akuntabilitas belanja pegawai
- Mendukung TPP berbasis kinerja dan disiplin
- Menjadi alat pengendalian dan evaluasi kinerja ASN
- Memperkuat peran BPKAD dalam reformasi birokrasi

e-Kinerja ASN membantu BPKAD :

- Menyelaraskan realisasi belanja pegawai dengan output kinerja
- Mendukung evaluasi efisiensi belanja ASN

- Berikut screenshoot aplikasi e-Kinerja :

Gambar 2.4 Aplikasi e-Kinerja

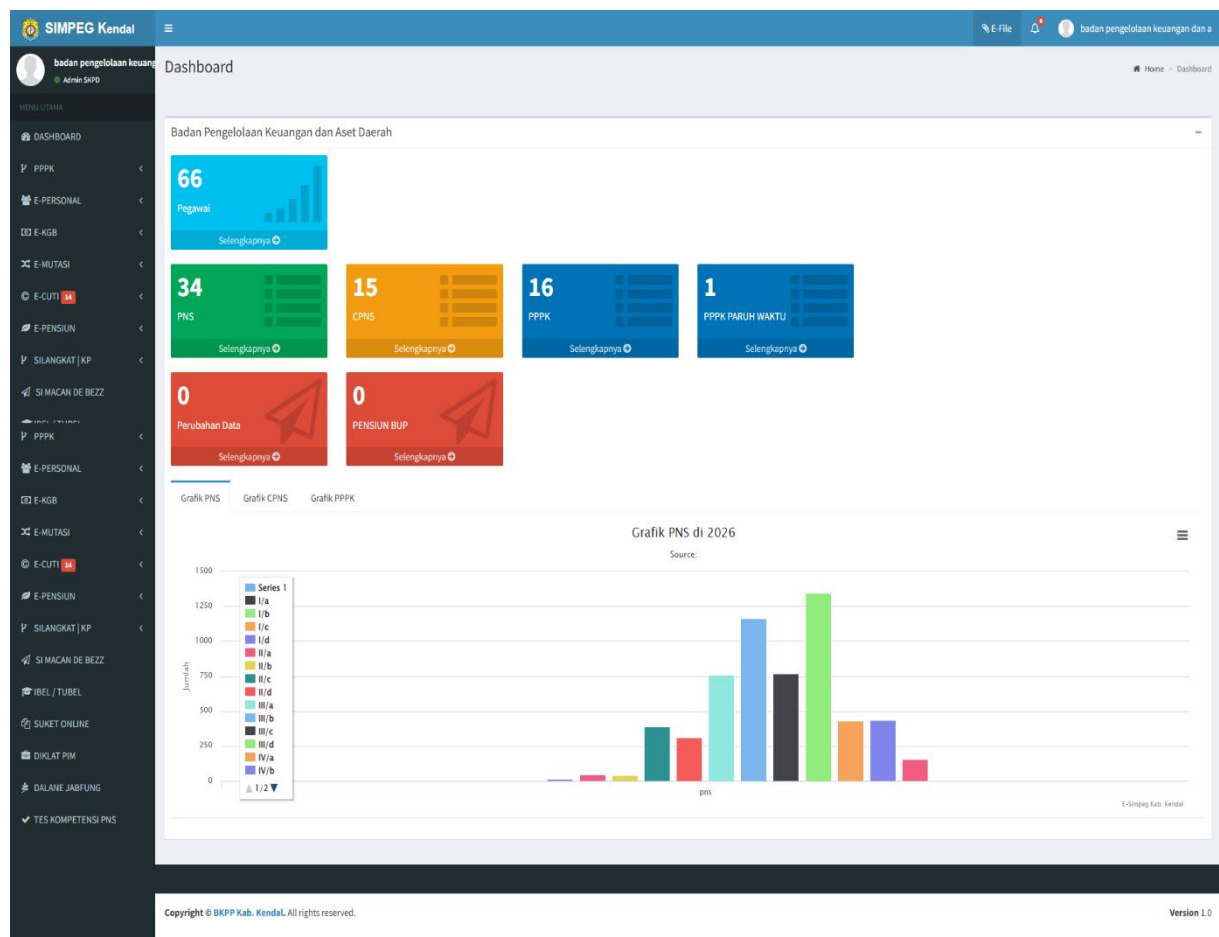
12. Aplikasi E-SIMPEG

Aplikasi e-SIMPEG adalah Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian berbasis elektronik yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk mengelola data kepegawaian ASN secara terintegrasi, akurat, dan mutakhir.

Fungsi utama aplikasi e-SIMPEG :

- a. Pengelolaan data induk ASN
 - Identitas pegawai
 - Status kepegawaian (PNS/PPPK)
 - Pangkat, golongan, jabatan
- b. Manajemen riwayat kepegawaian
 - Riwayat Pendidikan
 - Diklat dan pelatihan
 - Riwayat jabatan dan mutase
 - Kenaikan pangkat dan gaji berkala
- c. Administrasi kepegawaian
 - Usulan kenaikan pangkat
 - Mutasi dan promosi
 - Pensiun
 - Hukuman disiplin
- d. Penyediaan data dan laporan
 - Data kebutuhan formasi
 - Analisis jabatan (Anjab) & Analisis beban kerja (ABK)
 - Laporan untuk BKD/BKPSDM, BKN, dan MenPAN-RB
- e. Integrasi system
 - Terhubung dengan BKN (SIASN/MyASN)
 - Terintegrasi dengan e-Kinerja ASN dan sistem TPP di banyak Pemda

Berikut screenshoot aplikasi e-SIMPEG :



Gambar 2.5 Aplikasi e-SIMPEG

13. Survei Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah.

Survei kepuasan masyarakat dilakukan untuk menilai kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh perangkat daerah. Ini merupakan salah satu cara untuk mengukur kinerja berdasarkan pandangan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima. Hasil survei ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam perbaikan kualitas pelayanan.

SKM bertujuan untuk mengetahui :

- persepsi masyarakat sebagai pengguna layanan
- kualitas pelayanan yang diterima
- kelemahan dan kelebihan layanan
- sebagai dasar perbaikan pelayanan publik secara berkelanjutan.

Unsur Survei Kepuasan Masyarakat (9 unsur) :

1. Persyaratan
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur
3. Waktu penyelesaian
4. Biaya/tarif
5. Produk spesifikasi jenis layanan
6. Kompetensi pelaksana
7. Perilaku pelaksana
8. Sarana dan prasarana
9. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

Metode pelaksanaan

- Kuesioner manual atau digital
- Responden: pengguna layanan (masyarakat, OPD, instansi lain, pelaku usaha)
- Periode : minimal 1 kali dalam setahun

Hasil SKM yaitu Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) skala 0–100

Kategori:

- A (Sangat Baik): 88,31–100
- B (Baik): 76,61–88,30
- C (Kurang Baik): 65,00–76,60
- D (Tidak Baik): < 65,00

Tindak lanjut wajib

- Analisis hasil SKM
- Penyusunan rencana tindak lanjut perbaikan layanan
- Publikasi hasil SKM
- Digunakan sebagai bukti dukung RB & pelayanan public

Contoh SKM pada BPKAD

Layanan yang disurvei antara lain : pencairan dana/SP2D, pelayanan aset/BMD, pelayanan penganggaran, konsultasi keuangan daerah.

KUSUKA
Kuesioner
Laporan
Petunjuk Operasional
Logout

FORM INPUT RESPONDEN

PROFILE
PENDAPAT TENTANG PELAYANAN

Tgl. Survei

2026-02-09

Kode Kuesioner

Otomatis

Jenis Kelamin

Jenis Kelamin Harus diisi.1

Pendidikan

Pendidikan Harus diisi.2

Pekerjaan

Pekerjaan Harus diisi.1

Pekerjaan Lainnya

Uda

Uda Harus diisi dengan Angka.1

No. HP

No HP Harus diisi dengan Angka.1

Jenis layanan

Jenis Layanan Harus diisi.1

Jenis layanan lainnya

Simpan
Kosong
Cari

Gambar 2.6 Aplikasi KUSUKA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

- a. Sangat Baik : >100%
- b. Baik : 85 – 100%
- c. Cukup : 65 – 84,99%
- d. Kurang : 50 – 64,99%
- e. Sangat Kurang : <50%

Pada tahun 2025, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Berikut Capaian Kinerja BPKAD Kab. Kendal yang merupakan penilaian dari Tahun Anggaran sebelumnya, yaitu :

**Tabel 3.1 Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kendal berdasarkan Renstra 2021-2026**

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%	
	Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini Badan Pemeriksaa Keuangan (BPK)	WTP	WTP	WTP	100	WTP
1.	Meningkatnya pengelolaan, keuangan dan pemanfaatan aset daerah	IPKD (Indek Pengelolaan Keuangan Daerah)	rentang IPKD	79,329	64,016	80,69	79,330
2.	Meningkatnya akuntabilitas Perangkat daerah	Nilai SAKIP	Predikat SAKIP	82,34	78,20	94,97	82,35
Rata2 capaian						91.88	

Sumber Data : BPKAD Kab. Kendal

Dari data di atas dapat dilihat bahwa Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal termasuk kategori “Baik” karena realisasi capaian kinerja ada di rentang 85 – 100 %.

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal berdasarkan Renstra 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%	
	Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah	IPKD (Indek Pengelolaan Keuangan Daerah)	Indeks	76,329	64,016	83,86	79,50
1.	Meningkatnya Kualitas laporan keuangan	Opini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)	Predikat	WTP	WTP	100	WTP
2.	Meningkatnya Temuan pemeriksaan BMD yang ditindaklanjuti	Persentase Tindak Lanjut Temuan Pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terkait BMD	%	100	100	100	100
3.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP	Poin	82,34	78,20	94,97	82,39
Rata2 capaian						94,70	

Sumber Data : BPKAD Kab. Kendal

Dari data di atas dapat dilihat bahwa Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal termasuk kategori “Baik” karena realisasi capaian kinerja ada di rentang 85 – 100 %.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.3 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2026

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
	Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini Badan Pemeriks Keuangan (BPK)	WTP	WTP	100	WTP	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI)
1.	Meningkatnya pengelolaan, keuangan dan pemanfaatan aset daerah	IPKD (Indek Pengelolaan Keuangan Daerah)	79,329	64,016	80,69	Perlu perbaikan	Bappeda Prov. Jawa Tengah ipkd- bskdn.kemendagri.go.id
2.	Meningkatnya akuntabilitas Perangkat daerah	Nilai SAKIP	82,34	78,20	94,97	BB	Inspektorat Kab. Kendal

Sumber Data : BPKAD Kab. Kendal

Dari data di atas untuk Opini BPK sudah diperoleh hasil yang maksimal yaitu WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), untuk nilai IPKD masih perlu perbaikan, dan Nilai SAKIP BPKAD sudah termasuk kateori BB, namun lebih baik dapat ditingkatkan.

Tabel 3.4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2025-2029

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
	Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah	IPKD (Indek Pengelolaan Keuangan Daerah)	76,329	64,016	83,86	Perlu perbaikan	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI)
1.	Meningkatnya Kualitas laporan keuangan	Opini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)	WTP	WTP	100	Baik	Bappeda Prov. Jawa Tengah ipkd-bskdn. kemendagri.go.id
2.	Meningkatnya Temuan pemeriksaan BMD yang ditindaklanjuti	Persentase Tindak Lanjut Temuan Pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terkait BMD	100	100	100	Baik	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Provinsi Jawa Tengah
3.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP	82,34	78,20	94,97	BB	Inspektorat Daerah

Sumber Data : BPKAD Kab. Kendal

Dari data di atas terlihat bahwa nilai IPKD masih perlu perbaikan, untuk tahun berikutnya agar lebih meningkat.

Untuk Opini BPK LKPD tahun 2025 sudah memperoleh hasil yang baik yaitu WTP (Wajar Tanpa pengecualian).

Persentase tindak lanjut temuan pada laporan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD terkait BMD sudah 100%. Hal ini yang mendukung tercapainya WTP untuk LKPD Pemda.

Nilai SAKIP BPKAD memperoleh kategori BB, sudah baik, akan tetapi dapat ditingkatkan lagi untuk tahun berikutnya.

- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.5 Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 s.d 2025
Berdasarkan Renstra 2021-2026

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100
1.	Meningkatnya pengelolaan, keuangan dan pemanfaatan aset daerah	IPKD (Indek Pengelolaan Keuangan Daerah)	79,327	70,641	89,05	79,328	75,567	95,26	79,329	64,016	80,69
2.	Meningkatnya akuntabilitas Perangkat daerah	Nilai SAKIP	82,32	78,10	94,88	82,33	78,25	95,04	82,34	78,20	94,97

Sumber Data : BPKAD Kab. Kendal

Dari data tersebut diketahui bahwa BPKAD selalu mempertahankan opini WTP BPK untuk LKPD Pemda Ka. Kendal. Nilai IPKD mengalami peningkatan dari tahun 2023 yaitu 70,641 menjadi 75,567 pada tahun 2024. Namun pada tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 64,016. Hal ini dikarenakan adanya perubahan bobot nilai dari masing-masing dimensi pada penilaian IPKD.

Nilai SAKIP BPKAD pada tahun 2024 lebih baik dari tahun 2023, sedangkan tahun 2025 mengalami penurunan 0,05 point menjadi 78,20, walaupun masih dalam predikat BB.

Tabel 3.6 Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 s.d 2025
Berdasarkan Renstra 2025-2029

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah	IPKD (Indek Pengelolaan Keuangan Daerah)	79,327	70,641	89,05	79,328	75,567	95,26	76,329	64,016	83,86
1.	Meningkatnya Kualitas laporan keuangan	Opini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100
2.	Meningkatnya Temuan pemeriksaan BMD yang ditindaklanjuti	Persentase Tindak Lanjut Temuan Pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terkait BMD	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP	82,32	78,10	94,88	82,33	78,25	95,04	82,34	78,20	94,97

Sumber Data : BPKAD Kab. Kendal

Dari data tersebut, untuk target indikator kinerja opini BPK selalu mencapai 100% yaitu opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Begitu juga dengan indikator persentase Tindak Lanjut Temuan Pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terkait BMD selalu mencapai 100%. Hal ini terkait dengan kinerja keuangan BPKAD yang harus selalu mencapai hasil yang maksimal.

Untuk nilai IPKD dan Nilai SAKIP mengalami fluktuatif, yaitu kenaikan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Namun mengalami penurunan dari tahun 2024 ke tahun 2025. Ini diharapkan dapat menjadi motivasi agar di tahun berikutnya ada perbaikan nilai sehingga dapat meningkat.

3. Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

**Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Awal Renstra 2021-2026
dengan Tahun Ini (Tahun 2021 dan Tahun 2025)**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2021	Target Akhir 2025	Tingkat Kemajuan
	Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)	WTP	WTP	0
1.	Meningkatnya pengelolaan, keuangan dan pemanfaatan aset daerah	IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	57,553	79,329	37,84 %
2.	Meningkatnya akuntabilitas Perangkat daerah	Nilai SAKIP	78,35	82,34	5,09%

Sumber Data : BPKAD Kab. Kendal

Dari data tersebut dapat dilihat antara capaian tahun awal Renstra yaitu tahun 2021 dengan target tahun 2025 ada kemajuan, baik untuk indikator kinerja IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah) dengan nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah). Adanya tingkat kemajuan ini mencerminkan adanya keinginan untuk terus meningkatkan kinerja di BPKAD.

Pada tahun 2021 realisasi IPKD 57,553, dan target 2025 yaitu 79,329. Walau terpaut jauh, tetapi BPKAD selalu berusaha meningkatkan kinerja sehingga dipasang target 79,329.

Untuk nilai SAKIP pada tahun 2021 yaitu 78,35 sedangkan target 2025 adalah 82,34. Ini mencerminkan BPKAD akan meningkatkan kinerja di tahun 2025.

**Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Awal Renstra 2025-2029
dengan Tahun Ini (Tahun 2021 dan Tahun 2025)**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2021	Target Akhir 2025	Tingkat Kemajuan
	Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah	IPKD (Indek Pengelolaan Keuangan Daerah)	57,553	79,329	37,84 %
1.	Meningkatnya Kualitas laporan keuangan	Opini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)	WTP	WTP	0
2.	Meningkatnya Temuan pemeriksaan BMD yang ditindaklanjuti	Persentase Tindak Lanjut Temuan Pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terkait BMD	100%	100%	0
3.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP	78,35	82,34	5,09%

Sumber Data : BPKAD Kab. Kendal

Walaupun capaian IPKD pada tahun 2021 termasuk rendah, namun di tahun 2025 BPKAD memasang target tinggi karena sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja. Untuk opini BPK dan persentase tindak lanjut temuan pada laporan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD terkait BMD tidak ada kemajuan target karena capaian opini BPK yaitu WTP dan persentase tindak lanjut temuan pada laporan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD terkait BMD sebanyak 100% sudah target maksimal.

Untuk nilai SAKIP pada tahun 2021 tercapai cukup tinggi yaitu 78,35 sehingga BPKAD memasang target yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah yaitu 82,34.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional Berdasarkan Renstra 2021-2026

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Standar Nasional	% Capaian
	Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini Badan Pemeriksaa Keuangan (BPK)	WTP	WTP	100
1.	Meningkatnya pengelolaan, keuangan dan pemanfaatan aset daerah	IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	64,016	79,424	80,60
2.	Meningkatnya akuntabilitas Perangkat daerah	Nilai SAKIP	78,20	100	78,20

Sumber Data : BPKAD Kab. Kendal

Dari data tersebut, hasil capaian kinerja BPKAD sudah cukup baik jika dibandingkan dengan standar nasional. Untuk Opini BPK sudah sama dengan standar nasional yaitu mencapai WTP, nilai IPKD 80,60% sedangkan nilai SAKIP mencapai 78,20 %.

Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional Berdasarkan Renstra 2025-2029

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Standar Nasional	% Capaian
	Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah	IPKD (Indek Pengelolaan Keuangan Daerah)	64,016	79,424	80,60
1.	Meningkatnya Kualitas laporan keuangan	Opini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)	WTP	WTP	100
2.	Meningkatnya Temuan pemeriksaan BMD yang ditindaklanjuti	Persentase Tindak Lanjut Temuan Pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terkait BMD	100	100	100
3.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP	78,20	100	78,20

Sumber Data : BPKAD Kab. Kendal

Dari data tersebut, perbandingan realisasi kinerja BPKAD dengan standar nasional sudah cukup baik. Untuk Opini BPK dan persentase tindak lanjut temuan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terkait BMD di BPKAD Kab. Kendal sudah mencapai hasil maksimal, yaitu WTP untuk Opini BPK dan 100% untuk persentase tindak lanjut temuan pada laporan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD terkait BMD. Sedangkan IPKD dan Nilai SAKIP masih perlu peningkatan di tahun-tahun berikutnya, karena baru mencapai 80,60% untuk IPKD dan 78,20% untuk Nilai SAKIP.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.11 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja Berdasarkan Renstra 2021-2026

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
	Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini Badan Pemeriksaa Keuangan (BPK)	WTP	WTP	100	Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel	
1.	Meningkatnya pengelolaan, keuangan dan pemanfaatan aset daerah	IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	79,329	64,016	80,60	Kurangnya koordinasi lintas OPD yang memiliki dokumen pendukung IPKD, Perubahan bobot nilai tiap dimensi IPKD dan aplikasi IPKD yang sering eror, serta kelengkapan dokumen yang dipersiapkan tidak secara rutin, tetapi hanya saat akan ada penilaian	Memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan, meningkatkan transparansi, dan membangun sistem pengendalian internal yang lebih kuat serta rutin mempersiapkan kelengkapan dokumen, tidak hanya saat akan dimulainya penilaian IPKD
2.	Meningkatnya akuntabilitas Perangkat daerah	Nilai SAKIP	82,34	78,20	94,97	Data dari bidang tidak dikumpulkan tepat waktu, Kurangnya Pemantauan dan Evaluasi Kinerja.	Memperkuat sistem perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja secara menyeluruh

Sumber Data : BPKAD Kab. Kendal

Tabel 3.12 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja
Berdasarkan Renstra 2025-2029

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
	Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah	IPKD (Indek Pengelolaan Keuangan Daerah)	76,329	64,016	83,86	Kurangnya koordinasi lintas OPD yang memiliki dokumen pendukung IPKD, Perubahan bobot nilai tiap dimensi IPKD dan aplikasi IPKD yang sering eror, serta kelengkapan dokumen yang dipersiapkan tidak secara rutin, tetapi hanya saat akan ada penilaian	Memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan, meningkatkan transparansi, dan membangun sistem pengendalian internal yang lebih kuat serta rutin mempersiapkan kelengkapan dokumen, tidak hanya saat akan dimulainya penilaian IPKD
1.	Meningkatnya Kualitas laporan keuangan	Opini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)	WTP	WTP	100	Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel	
2.	Meningkatnya Temuan pemeriksaan BMD yang ditindaklanjuti	Persentase Tindak Lanjut Temuan Pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terkait BMD	100	100	100	Komitmen pimpinan daerah dan perangkat daerah, Sinergi dengan Inspektorat Daerah, Penguatan fungsi pembinaan BPKAD kepada OPD, Pelaksanaan inventarisasi dan rekonsiliasi BMD secara berkala	
3.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP	82,34	78,20	94,97	Data dari bidang tidak dikumpulkan tepat waktu, Kurangnya Pemantauan dan Evaluasi Kinerja.	Memperkuat sistem perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja secara menyeluruh

Sumber Data : BPKAD Kab. Kendal

Dari tabel 3.12 tersebut didapat analisis yang menyebabkan keberhasilan ataupun kegagalan capaian kinerja. Analisis keberhasilan menjadi sikap yang akan terus dipertahankan agar selalu mencapai kinerja yang ditargetkan. Sedangkan analisis kegagalan dicari solusi bersama agar untuk tahun-tahun berikutnya dapat tercapai target kinerja yang maksimal.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Memuat analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

**Tabel 3.13 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025
Renstra 2021-2026**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran				Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%	Anggaran Penetapan (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah	WTP	WTP	100	442.092.417.673	423.538.625.035	354.057.845.735	80,09	19,91%
1.	Meningkatnya pengelolaan, keuangan dan pemanfaatan aset daerah	79,329	64,016	80,60	431.097.813.656	415,160,414,450	346.498.164.482	83,46	19,62%
2.	Meningkatnya akuntabilitas Perangkat daerah	82,34	78,20	94,97	10.994.604.017	8.378.210.585	7.559.681.253	90,23	31,24%

Sumber Data : BPKAD Kab. Kendal

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi pelaksanaan kegiatan pada BPKAD Kabupaten Kendal mencapai 19,91%, dengan efisiensi untuk mencapai sasaran “meningkatnya pengelolaan, keuangan dan pemanfaatan aset daerah” sebanyak 19,62% dan untuk sasaran “meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah” mencapai efisiensi sebanyak 31,24%. Efisiensi ini dikarenakan ada pengalihan untuk kegiatan lain yang lebih prioritas.

Tabel 3.14 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025
Renstra 2025-2029

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran				Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%	Anggaran Penetapan (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah	76,329	64,016	83,86	442.092.417.673	423.538.625.035	354.057.845.735	80,09	19,91%
1.	Meningkatnya Kualitas laporan keuangan	WTP	WTP	100	429.207.087.656	413.944.802.950	412.845.807.486	97,86	3,81%
2.	Meningkatnya Temuan pemeriksaan BMD yang ditindaklanjuti	100	100	100	1.890.726.000	1.215.611.500	641.726.061	52,79	66,06%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	82,34	78,20	94,97	10.994.604.017	8.378.210.585	7.559.681.253	90,23	31,24%

Sumber Data : BPKAD Kab. Kendal

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan pada BPKAD Kabupaten Kendal tahun 2025 mencapai 19,91%. Dengan efisiensi kegiatan yang mendukung sasaran “meningkatnya kualitas laporan keuangan” sebesar 3,81%, efisiensi kegiatan yang mendukung sasaran “meningkatnya temuan pemeriksaan BMD yang ditindaklanjuti sebesar 66,06%. Dan efisiensi pelaksanaan kegiatan yang mendukung sasaran “meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebesar 31,24%.

Efisiensi tertinggi pada kegiatan yang mendukung sasaran “meningkatnya temuan pemeriksaan BMD yang ditindaklanjuti” dikarenakan kegiatan yang hendak dilaksanakan bertentangan dengan prinsip efisiensi seperti jasa konsultan yang terlalu mahal dan pengadaan server yang bernilai terlalu tinggi, sehingga anggaran yang tersedia lebih baik menjadi SILPA yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain yang lebih prioritas.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.15 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Kinerja Berdasarkan Renstra 2021-2026

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
	Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	100				
1.	Meningkatnya pengelolaan, keuangan dan pemanfaatan aset daerah	IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	80,60	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase kesesuaian APBD dengan KUA PPAS	100	Menunjang
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (kemenkeu, KPPN,KPP, Taspen)	100	Menunjang
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase OPD menyusun laporan keuangan sesuai standar keuangan	100	Menunjang
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase sistem keuangan yang terintegrasi	100	Menunjang
				Program pengelolaan barang milik daerah	Prosentase aset daerah yang dikelola dengan baik	100	Menunjang
2.	Meningkatnya akuntabilitas Perangkat daerah	Nilai SAKIP	94,97	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Prosentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat	100	Menunjang

Sumber Data : BPKAD Kab. Kendal

Tabel 3.16 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Kinerja
Berdasarkan Renstra 2025-2029

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
	Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah	IPKD (Indek Pengelolaan Keuangan Daerah)	83,86				
1.	Meningkatnya Kualitas laporan keuangan	Opini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)	100	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kesesuaian APBD dengan KUA PPAS	100	Menunjang
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	100	Menunjang
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD menyusun laporan keuangan sesuai standar keuangan	100	Menunjang
2.	Meningkatnya Temuan pemeriksaan BMD yang ditindaklanjuti	Persentase Tindak Lanjut Temuan Pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terkait BMD	100	Program pengelolaan barang milik daerah	Persentase aset daerah yang dikelola dengan baik	100	Menunjang
3.	Meningkatnya akuntabilitas Perangkat daerah	Nilai SAKIP	94,97	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, pelayanan umum, kepegawaian serta keuangan Perangkat Daerah	100	Menunjang

Sumber Data : BPKAD Kab. Kendal

Dari tabel 3.15 dan tabel 3.16, semua program menunjang keberhasilan kinerja, baik dalam rangka pencapaian tujuan sasaran Renstra tahun 2021-2026 ataupun Renstra 2025-2029.

Terdapat perbedaan program yang menunjang keberhasilan kinerja pada Renstra 2021-2026 dan Renstra 2025-2029. Pada Renstra 2021-2026 untuk Program Pengelolaan BMD menunjang keberhasilan kinerja untuk mendukung sasaran “Meningkatnya pengelolaan, keuangan dan pemanfaatan aset daerah” Bersama dengan Program Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan pada Renstra 2025-2029 Program Pengelolaan BMD berdiri sendiri menunjang keberhasilan kinerja untuk mencapai sasaran “Meningkatnya temuan pemeriksaan BMD yang ditindaklanjuti”.

Persentase sistem keuangan yang terintegrasi tidak lagi menjadi indikator kinerja Program Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Renstra 2025-2029 karena indikator tersebut bukan ukuran kinerja layanan langsung, tetapi merupakan ukuran tingkat keterhubungan antar-sistem TI dan proses internal. Sedangkan aplikasi sistem keuangan sudah ditentukan dari Pemerintah Pusat, sehingga untuk proses integrasi bukan kewenangan dari Pemerintah Daerah.

B. Realisasi dan Efisiensi Anggaran

Tabel 3.17 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Fisik	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian Keuangan
I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		%	100	100	95,79	8.378.210.585	7.559.681.253	90,23
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	11	11	100	92.650.000	75.259.532	81,23
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	100	42.650.000	29.368.532	68,86
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	8	8	100	-	-	0
	3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	100	50.000.000	45.891.000	91,78
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	14	14	100	6.477.165.635	6.044.264.865	93,32

No	Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Fisik	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian Keuangan
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	37	37	100	6.477.165.635	6.044.264.865	93,32
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Orang	61	37	0	-	-	0
	1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	20	20	0	-	-	0
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100	1.029.069.234	851.313.803	82,73
	1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	3	3	100	101.908.000	78.028.698	76,57
	2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket	4	4	100	2.382.750	1.800.000	75,54
	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	12	12	100	56.820.000	19.625.850	34,54
	4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	3	3	100	70.527.084	54.914.876	77,86
	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	12	12	100	-	-	0
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100	759.146.900	662.993.859	87,33
	7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1000	1000	100	38.284.500	33.950.520	88,68
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	11	1	100	180.000	-	0
	1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	5	1	100	180.000	-	0
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	100	537.385.716	403.580.030	75,10
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100	12.000.000	5.361.960	44,68
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	12	100	275.204.500	195.401.940	71,00
	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	12	100	250.181.216	202.816.130	81,07
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	94	94	100	241.760.000	185.263.023	76,63
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Unit	81	81	100	142.000.000	112.985.523	79,57

No	Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Fisik	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian Keuangan
	Operasional atau Lapangan							
	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	12	12	100	99.760.000	72.277.500	72,45
	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	1	1	0	-	-	100
II. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		%	100	100	100	413.944.802.950	345.856.438.421	78,84
8	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Dokumen	5	5	100	217.860.400	143.516.024	65,88
	1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen	2	2	100	13.725.750	3.280.000	23,90
	2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	2	2	100	14.800.700	3.387.500	22,89
	3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Dokumen	53	53	100	6.025.000	4.400.000	73,03
	4. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	53	53	100	3.875.000	2.260.000	58,32
	5. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	1	1	100	147.975.000	112.515.324	76,04
	6. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2	2	100	27.510.000	14.077.200	51,17
	7. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	12	12	100	3.948.950	3.596.000	91,06
9	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	OPD	49	49	100	146.836.500	124.720.932	84,94
	1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	6	6	100	101.915.000	99.702.400	97,83

No	Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Fisik	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian Keuangan
	2. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	184	184	100	8.495.000	7.250.000	85,34
	3. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	2	2	100	34.145.000	15.868.532	46,47
	4. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	5	5	100	2.281.500	1.900.000	83,28
10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	OPD	51	51	100	74.998.800	69.348.064	92,47
	1. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	79	79	100	16.889.000	16.602.532	98,30
	2. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	5	5	100	44.144.800	42.795.532	96,94
	3. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	51	51	100	840.000	750.000	89,29
	4. Penyusunan Tanggapan / Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	2	2	100	750.000	750.000	100,00
	5. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional	Dokumen	2	2	100	3.825.000	-	0,00

No	Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Fisik	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian Keuangan
	Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah							
	6. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota	Orang	31	31	100	8.550.000	8.450.000	98,83
11	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Laporan	266	266	100	413.465.107.250	345.500.891.381	83,56
	1. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	266	266	100	365.867.105.377	299.527.742.783	81,87
	2. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	1	1	100	5.265.986.000	3.641.132.725	69,14
	3. Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	100	42.332.015.873	42.332.015.873	100,00
12	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Laporan	2	2	100	40.000.000	17.962.020	44,91
	1. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	2	2	50	40.000.000	17.962.020	44,91
III. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		%	100	100	100			
13	Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	100	100	100	1.215.611.500	641.726.061	52,79
	1. Penyusunan Standar Harga	Dokumen	1	1	80	144.787.500	46.416.814	32,06
	2. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	2	2	100	6.125.000	1.500.000	24,49
	3. Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	1	100	260.320.000	40.400.774	15,52
	4. Inventarisasi Barang Milik Daerah	Laporan	1	1	80	78.995.000	65.868.532	83,38
	5. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	5	5	80	544.100.000	320.941.409	58,99

No	Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Fisik	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian Keuangan
	6. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	12	12	80	181.284.000	166.598.532	91,90
TOTAL BPKAD					95	423.538.625.035	354.057.845.735	83,60

Pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pada tahun pelaporan secara umum menunjukkan kinerja yang sangat baik dan akuntabel. Hal ini tercermin dari realisasi kinerja fisik sebesar 95% dengan realisasi anggaran sebesar Rp354.057.845.735 atau 83,60% dari total pagu anggaran Rp423.538.625.035. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mencapai capaian fisik sebesar 95,79% dan realisasi keuangan sebesar 90,23%. Program ini mencakup kegiatan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, serta administrasi umum perangkat daerah. Seluruh kegiatan utama pada program ini dapat direalisasikan sesuai target kinerja yang telah ditetapkan. Adapun perbedaan antara realisasi fisik dan keuangan pada beberapa subkegiatan menunjukkan adanya efisiensi belanja, terutama pada kegiatan yang menyesuaikan kebutuhan riil tanpa mengurangi output yang dihasilkan

Selanjutnya, Program Pengelolaan Keuangan Daerah menunjukkan capaian fisik 100%, dengan realisasi anggaran sebesar 78,84%. Seluruh rangkaian proses pengelolaan keuangan daerah, mulai dari penyusunan kebijakan anggaran (KUA–PPAS), RKA-SKPD, penetapan APBD dan Perubahan APBD, pengelolaan perbendaharaan, hingga pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Realisasi keuangan yang belum sepenuhnya optimal disebabkan oleh penyesuaian kebutuhan aktual serta efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, namun tidak berdampak pada ketercapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah juga mencapai capaian fisik 100%, dengan realisasi anggaran sebesar 52,79%. Kegiatan pengelolaan BMD, meliputi penyusunan standar harga, perencanaan kebutuhan BMD, penatausahaan, inventarisasi, optimalisasi pemanfaatan, serta penyusunan laporan BMD, telah dilaksanakan sesuai target kinerja. Rendahnya persentase realisasi anggaran pada beberapa subkegiatan lebih disebabkan oleh efisiensi pelaksanaan dan penyesuaian volume kegiatan, tanpa mengurangi kualitas dan kelengkapan output yang dihasilkan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja program dan kegiatan BPKAD pada tahun pelaporan menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD telah berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel, serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung terwujudnya tata kelola keuangan dan aset daerah yang transparan dan bertanggung jawab. Hasil ini menjadi dasar yang kuat untuk peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pada tahun berikutnya.

Tabel 3. 18 Efisiensi Anggaran

No	Program	Anggaran Penetapan	Anggaran Perubahan	Efisiensi
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	10.994.604.017	8.378.210.585	23,8%
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	429.207.087.656	413.944.802.950	3,6%
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.890.726.000	1.215.611.500	35,7%

Pelaksanaan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pada tahun pelaporan menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran dapat dilaksanakan secara efektif tanpa menurunkan capaian kinerja. Hal ini tercermin dari adanya penyesuaian anggaran pada seluruh program, yang tetap diiringi dengan ketercapaian target kinerja fisik sesuai yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan telah berjalan secara optimal dan berorientasi pada hasil.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terjadi efisiensi anggaran sebesar 23,8%, dari anggaran penetapan Rp10.994.604.017 menjadi Rp8.378.210.585 pada anggaran perubahan. Meskipun mengalami penurunan anggaran yang cukup signifikan, seluruh kegiatan penunjang tetap dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Efisiensi ini diperoleh melalui pengendalian belanja operasional, optimalisasi pelaksanaan kegiatan, serta penyesuaian volume kegiatan berdasarkan kebutuhan riil, tanpa mengurangi kualitas layanan administrasi dan dukungan manajerial perangkat daerah.

Selanjutnya, Program Pengelolaan Keuangan Daerah mengalami efisiensi sebesar 3,6%, dari anggaran penetapan Rp429.207.087.656 menjadi Rp413.944.802.950. Efisiensi tersebut tidak berdampak pada pelaksanaan tugas pokok pengelolaan keuangan daerah, yang tetap berjalan sesuai jadwal dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seluruh tahapan strategis, mulai dari penyusunan kebijakan anggaran, pelaksanaan perbendaharaan, hingga akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, tetap terlaksana secara optimal dengan capaian kinerja fisik mencapai 100%.

Sementara itu, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah mencatat efisiensi tertinggi, yaitu sebesar 35,7%, dari anggaran penetapan Rp1.890.726.000 menjadi Rp1.215.611.500. Meskipun efisiensi dilakukan secara signifikan, seluruh kegiatan pengelolaan barang milik daerah, termasuk perencanaan kebutuhan, penatausahaan, inventarisasi, optimalisasi pemanfaatan, serta penyusunan laporan BMD, tetap mencapai target kinerja yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan mampu menjaga kualitas output meskipun dengan dukungan anggaran yang lebih efisien.

Secara keseluruhan, capaian efisiensi anggaran BPKAD pada tahun pelaporan membuktikan bahwa pengelolaan anggaran yang efisien dapat berjalan seiring dengan pencapaian kinerja yang optimal. Kebijakan efisiensi yang diterapkan tidak hanya berkontribusi pada pengendalian fiskal daerah, tetapi juga memperkuat prinsip value for money, sehingga setiap alokasi anggaran yang digunakan memberikan manfaat maksimal bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

C. Inovasi

Inovasi yang diterapkan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal pada Tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.19 Inovasi pada BPKAD Kab. Kendal Tahun 2025

No	Judul Inovasi	Deskripsi Inovasi	Unit Kerja Pengelola / Pelaksana / Penanggungjawab Inovasi (Bidang/Sekretariat/UPTD)
1.	Sibemo (Aplikasi Belanja Moedah)	Inovasi Sibemo (Aplikasi Belanja Moedah) berbasis website memudahkan penyusunan SHS dengan output Perbup SHS yang dapat diakses OPD dan Stake Holder kapanpun	Bidang Pengelolaan Aset Daerah
2.	Si Manis Keren (sistem informasi rekening satuan kerja perangkat daerah) untuk optimalisasi pengelolaan rekening satuan kerja perangkat daerah di kabupaten kendal	Integrasi SI MANIS KEREN dengan Bank Jateng untuk Saldo Bank semua rekening dalam rangka memberikan informasi kepada Pemakai Informasi secara Real Time	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi
3.	Digitalisasi Pengelolaan Dana Hibah Berbasis Web Kabupaten Kendal	Menciptakan transparansi pengelolaan hibah, Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Kendal, Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Kendal	Bidang Anggaran
4.	Petasan Abang (Peta Aset Tanah dan Bangunan)	Strategi optimalisasi pengelolaan aset tanah dan bangunan guna menunjang Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal	Kepala BPKAD

D. Penghargaan

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal dalam melaksanakan fungsinya mempunyai membantu tugas Bupati dalam urusan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan, diantaranya adalah melakukan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Daerah serta melaporkannya dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai bahan / materi Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia guna memperoleh Penilaian / Opini atas penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang keuangan, yang merupakan tolok ukur atas kinerja keuangan Daerah.

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Kendal telah memperoleh OPINI Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke delapan kalinya. Berikut rekapitulasi perolehan Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam 10 (sepuluh Tahun Terakhir) :

Tabel 3.20 Rekapitulasi Perolehan Opini BPK RI pada Kabupaten Kendal 10 Tahun Terakhir

NO	TAHUN LKPD	OPINI
1	2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2	2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3	2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4	2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
5	2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
6	2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
7	2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
8	2023	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
9	2024	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
10	2025	Masih dalam Proses Audit BPK RI

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kendal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal.

Visi Misi pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal merupakan pelaksanaan Visi dari Bupati tahun 2021-2026 yaitu “Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan” serta melaksanakan Misi “Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan Industri Kecil dan Menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif”.

Periode 2025-2029 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal melaksanakan Visi Bupati dan Wakil Bupati Kendal terpilih dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah: “Bersama Membangun Kendal Semakin Maju, Sejahtera, Adil, Makmur, Lestari dan Berkelanjutan” dan mendukung pencapaian misi ke-2 yaitu: “Tata Kelola Pemerintah yang Efektif, Akuntabel, Inklusif”.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal disusun sebagai upaya untuk menindaklanjuti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 – 2029.

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja Tahun 2025 yakni dari data Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran diperoleh realisasi pencapaian kinerja rata-rata pada Tahun 2025 adalah sebesar 83,60%.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja serta analisis terhadap faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun berjalan, maka disampaikan beberapa rekomendasi sebagai bahan perbaikan kinerja pada periode berikutnya, yaitu:

1. Penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja melalui penyelarasan yang lebih konsisten antara dokumen perencanaan, indikator kinerja, dan alokasi anggaran agar output dan outcome kegiatan semakin terukur dan berdampak langsung pada pencapaian tujuan perangkat daerah.
2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah dan Barang Milik Daerah (BMD), guna meningkatkan akurasi data, efisiensi proses kerja, serta transparansi dan akuntabilitas pelaporan.
3. Peningkatan kapasitas dan integritas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis berkelanjutan, penguatan budaya kinerja, serta internalisasi nilai profesionalisme untuk mendukung kualitas pelayanan dan tata kelola keuangan daerah.
4. Penguatan sistem pengendalian intern dan tindak lanjut hasil pengawasan termasuk percepatan penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan, sebagai upaya mitigasi risiko dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.
5. Peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah terutama dalam penyediaan data, pelaksanaan akuntansi, pelaporan keuangan, dan pengelolaan aset, agar tercipta keselarasan kebijakan dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah.

Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar dalam penyusunan rencana aksi dan perbaikan berkelanjutan, sehingga kinerja BPKAD pada tahun mendatang dapat semakin optimal dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD selama tahun anggaran berjalan, sekaligus sebagai wujud komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Capaian kinerja yang telah diraih merupakan hasil sinergi dan kerja sama seluruh jajaran BPKAD serta dukungan berbagai pemangku kepentingan. Namun demikian, masih terdapat tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama, khususnya dalam peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah, penguatan sistem pengendalian intern, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur.

Melalui evaluasi berkelanjutan dan pelaksanaan rekomendasi perbaikan, BPKAD Kabupaten Kendal berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah, serta mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD.

Akhir kata, semoga LKJIP ini dapat menjadi bahan evaluasi yang konstruktif dan landasan dalam penyusunan kebijakan serta program kerja pada tahun berikutnya, guna mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel demi keberhasilan pembangunan Kabupaten Kendal.

Kendal,

2026

**Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Kendal**



MARDI EDI SUSILO, SE.Par, M.Par
Pembina Tk. I
NIP. 19670917 199103 1 008